



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN SOSIAL
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

TESIS

REVO JUHANDA

NIM. 211003631010547

Program Studi : Magister Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2023



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN SOSIAL
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1975 Semarang

REVO JUHANDA

NPM: 211003631010547

Program Studi : Magister Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2023



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN SOSIAL
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

REVO JUHANDA

NPM: 211003631010547

Program Studi : Magister Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi, telah disetujui oleh pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, 7 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si

Dr. Karmanis, M.Si

Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Rini Werdiningsih, M.Si



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

REVO JUHANND

NPM: 211003631010547

Program Studi : Magister Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
Ketua Tim Penguji/ Pembimbing
2. Dr. Karmanis, M.Si
Penguji 1/ Pembimbing
3. Dr. Rini Werdiningsih, M.S
Penguji 2

Mengesahkan

Dekan FISIP UNTAG Semarang

Dr.Rini Werdiningsih,M.Si

NIDN. 0621105901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor) di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 7 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

Revo Juhanda

NPM. 211003631010547

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”.

Penulisan Tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis menyadari, bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi Tesis ini.

Besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Semarang, 7 Juli 2023

Penulis,

Revo Juhanda

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan, kesabaran dan kelancaran dalam menyusun tesis ini
2. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si selaku Rektor UNTAG Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini untuk hasil penelitian yang lebih baik serta telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Dr. Karmanis, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini untuk hasil penelitian yang lebih baik.
4. Dr. Rini Werdiningsih, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang dan sebagai penguji Tesis yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini untuk hasil penelitian yang lebih baik.
5. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik UNTAG Semarang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
6. Bapak Maryono, S.H. selaku Camat Banyumanik, Bapak Tjatur Edi Wardono, S.H. selaku Sekretaris Camat Banyumanik dan Bapak Soegiharto, S.E. selaku

Lurah Tinjomoyo yang telah memberikan ijin penelitian di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan memfasilitasi penulis selama penelitian berlangsung.

7. Bapak dan Ibu selaku responden penelitian, terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk penulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
8. Orang tua, Istri dan Sahabat yang selalu memberikan semangat, dorongan, restu dan doa untuk kelancaran penyelesaian penyusunan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Terima kasih atas bantuan dan bimbingan semua pihak yang sungguh amat tidak bernilai, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan yang lebih baik. Terima kasih.

Semarang, 07 Juli 2023

Penulis

Revo Juhanda

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Merupakan program Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kemiskinan. Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat dibutuhkan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan atau pedoman dalam mendorong kearah pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan dijadikan tema utama dalam pembangunan suatu negara dimana keberhasilannya diukur dari naik atau turunnya angka kemiskinan suatu negara tersebut

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif dengan penjelasan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Komunikasi sudah berjalan baik dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Sumber Daya personil sudah mencukupi. Disposisi/Sikap Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. Struktur birokrasi sudah sesuai dengan SOP Pelayanan DTKS.

Faktor pendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sikap yang antusias Keluarga Penerima Manfaat. Faktor penghambat adalah software pada penginputan data baru atau perubahan data tidak tersinkronisasi antara level di Dinas Sosial Kota Semarang ke Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial.

Kata Kunci : Implementasi. Kebijakan, Data terpadu, Keluarga Penerima Manfaat, Bantuan social.

ABSTRACT

Implementation of the Integrated Social Welfare Data Policy for Social Assistance Beneficiary Families in Banyumanik District, Semarang City, is a policy program of the Indonesian Government to overcome poverty. The government's role in overcoming poverty is very much needed, considering that the policies and regulations that are made become references or guidelines in pushing towards development.

Poverty is a major problem faced by developing countries. Poverty is the main theme in a country's development where its success is measured by the increase or decrease in a country's poverty rate.

Integrated Social Welfare Data (DTKS) is outlined in Minister of Social Affairs Regulation number 5 of 2019 concerning integrated social welfare data management. This research aims to describe and analyze the implementation of the Integrated Social Welfare Data Policy for Social Assistance Beneficiary Families in Banyumanik District, Semarang City as well as the supporting and inhibiting factors.

In this research, descriptive research methods were used with qualitative explanations. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that communication is running well and is carried out once a month. Personnel resources are sufficient. Disposition/Attitude Awareness and responsibility as a policy implementer is to provide understanding, clarity and assistance to recipients of social assistance benefits. The bureaucratic structure is in accordance with the DTKS Service SOP.

The supporting factor for Integrated Social Welfare Data for Social Assistance Beneficiary Families in Banyumanik District, Semarang City is the enthusiastic attitude of Beneficiary Families. The inhibiting factor is that the software for inputting new data or changing data is not synchronized between the levels at the Semarang City Social Service to the Central Java Provincial Social Service and the Ministry of Social Affairs.

Keywords: Implementation. Policy, integrated data, beneficiary families, social assistance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1

1.2. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Pustaka	18
2.2.1. Lingkup Kebijakan Publik	18
2.2.2. Teori dan Proses Kebijakan Publik	20
2.2.3. Bantuan Sosial	24
2.2.4. Konsep Implementasi Program	26
2.2.5. Model Implementasi	29
2.3. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian	39
3.3. Fokus Penelitian	39
3.4. Metode Pengumpulan Data	40
3.5. Penentuan Informan	41
3.6. Instrumen Penelitian	43
3.7. Sumber Data.....	45
3.8. Analisis Data	46
3.9. Jadwal Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Semarang	55
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang	55
4.1.2 Topografi Kota Semarang	56
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Banyumanik	57
4.1.4 Luas Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	59
4.1.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	60
4.1.6 Luas Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	61

4.1.7	Cara Pendaftaran DTKS	75
4.1.8	Kriteria Yang Tidak Mendapatkan DTKS	76
4.1.9	Gambaran Informan	77
4.2	Hasil Penelitian	78
4.2.1	Deskripsi Implementasi Aspek Komunikasi	78
4.2.1.1	Aspek Komunikasi	79
4.2.1.2	Sumber daya	81
4.2.1.3	Disposisi/ Sikap.....	83
4.2.1.4	Struktur Birokrasi.....	85
4.2.2	Faktor Pendukung dan penghambat	88
4.2.2.1	Faktor Pendukung	88
4.2.2.2	Faktor Penghambat	88
4.3	Pembahasan.....	89
4.3.1	Implementasi Kebijakan DTKS.....	89
4.3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Kerbijakan DTKS.....	93
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	95
5.2	Saran	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Kebijakan Publik	21
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	37
Gambar 3.1	Proses Analisa Data	48
Gambar 4.1	Peta Kota Semarang	55
Gambar 4.2	Peta Wilayah Kecamatan Banyumanik	58
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Kecamatan Banyumanik	62
Gambar 4.4	Cara Pendaftaran DTKS	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	DTKS Penerima Bansos di Kecamatan Banyumanik	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Zulbaidah.....	15
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu Faraz V Sahidi	15
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu Widyaningrum.....	16
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Helvie Gultom.....	17
Tabel 3	Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1	Data Luas Wilayah dan Jumlah RT/RW Kelurahan.....	59
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Banyumanik.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia menempatkan program pemenuhan kebutuhan pokok sebagai salah satu kebutuhan di tingkat masyarakat. Jadi penurunan kebutuhan di Indonesia adalah kekuasaan dan kewajiban, semuanya sama, khususnya pemerintah pusat, rakyat biasa dan pemerintah daerah/daerah dan setiap individu Indonesia. Keahlian dan kewajiban daerah/daerah dalam memajukan persahabatan jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan diatur, salah satunya adalah partai. Silaturahmi yang dimaksud adalah soal ramah tamah bantuan pemerintah.⁽¹⁾

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada saat itu, dengan melihat UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah juga dapat melihat UU No. 11 Tahun 2009, untuk mendapatkan pemahaman yang luas yang diidentikkan dengan pihak-pihak yang merupakan penyelenggara pemerintah.⁽²⁾

Beberapa di antaranya adalah pihak, khususnya pelanggaran kebutuhan atau penanggulangan kemiskinan (diperintahkan oleh UU No. 11/2009; UU No. 13/2011). Maka dalam UU No. 13/2011, Pemerintah Daerah memiliki kedudukan dan kewajiban untuk melakukan pelanggaran kebutuhan dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda).⁽³⁾

Artinya, keringanan kebutuhan di Indonesia bukan hanya menjadi kewajiban dan kewajiban Pusat, tetapi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban dan kewajiban yang sama. Mengingat amanat Undang-Undang, Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam merencanakan strategi dan proyek bantuan sosial pemerintah, khususnya terutama pada pendekatan dan proyek pengurangan kebutuhan, otoritas publik harus fokus dan mengacu pada pengaturan yang ada dan proyek di Kementerian Sosial Republik Indonesia⁽⁴⁾

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Bahkan tingkat kemiskinan saat ini dijadikan tolak ukur apakah suatu masyarakat sejahtera atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan dijadikan tema utama dalam pembangunan suatu negara dimana keberhasilannya diukur dari naik atau turunnya angka kemiskinan suatu negara tersebut. Problematika kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-harinya, baik kondisi fisik maupun kondisi ekonomi.⁽⁵⁾

Menurut⁽⁶⁾ secara umum akibat yang akan timbul dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas

partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi yang optimal.

Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan naik sebesar 3,20 persen, yaitu dari Rp. 440.538 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp. 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020. Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Tengah juga meningkat, mencapai 3,98 juta orang (11,41 persen), bertambah sebanyak 301 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58 persen).⁽⁷⁾

Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat dibutuhkan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan atau pedoman dalam mendorong kearah pembangunan. Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pembuatan program-program yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan diantaranya : menaikkan anggaran yang berkaitan (langsung/tidak langsung) melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, mendorong APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk program yang terkait, tetap mempertahankan program lama dan melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas harga. Serta

melalui instrumen utama yaitu program PNPM-Mandiri, pengembangan bahan bakar nabati, keluarga harapan serta permodalan melalui kredit mikro, serta program dan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.

Penelitian mengenai *corporate governance* penelitian yang khusus menguji kualitas layanan dalam perspektif *corporate governance* serta menguji faktor penghambat dan pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik belum dilakukan. Penelitian mengenai usaha peningkatan kualitas layanan publik perlu dilakukan mengingat pergeseran masyarakat menuju masyarakat yang lebih teredukasi menuntut pelayanan prima sesuai dengan konsep *good governance* yang mengedepankan partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis organisasi publik. Pelayanan public mencakup pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Government* salah satunya dengan membuat suatu kebijakan yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).⁽⁸⁾

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Melalui peraturan ini pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya data fakir miskin saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya yaitu data bantuan sosial, data pelayanan

kesejahteraan sosial (PPKS), dan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan mulai tahun 2020 penetapan DTKS mengalami perubahan dari sebelumnya 2 kali dalam setahun menjadi 4 kali dalam setahun yaitu bulan Januari, April, Juli dan Oktober⁽⁹⁾

Pelaksanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang yang telah selesai dari tahun 2017 hingga 2020 menyelubungi 16 Kecamatan di Kota Semarang, sejumlah 39.013 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Sosial. Dari sisi penyaluran bantuan, Dinas Sosial Kota Semarang mendapat porsi berbeda dari Kementerian Sosial RI sebanyak 39.031, di Kecamatan Banyumanik yang terdiri dari 11 Kelurahan sebanyak 154.444 jiwa dan jumlah Bantuan Sosial sebanyak 3089 jiwa dengan perincian data sebagai berikut: ⁽¹⁰⁾

TABEL .1
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial
Di Kecamatan Banyumanik

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Kelurahan Tinjomoyo	342
2.	Kelurahan Ngesrep	272
3.	Kelurahan Sumurboto	216
4.	Kelurahan Padangsari	240
5.	Kelurahan Pedalangan	283
6.	Kelurahan Sron dol Wetan	278
7.	Kelurahan Sron dol Kulon	277
8.	Kelurahan Pudukpayung	306
9.	Kelurahan Banyumanik	252
10.	Kelurahan Gedawang	344
11.	Kelurahan Jabungan	379
Jumlah		3089

Sumber : Data Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banyumanik, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kelurahan yang paling banyak menerima bantuan adalah Kelurahan Jabungan dikarenakan di Kelurahan Jabungan banyak masyarakat yang bekerjanya musiman sehingga manakala tidak ada pekerjaan akan menganggur. Dan Kelurahan yang paling sedikit menerima bantuan adalah Kelurahan Sumurobo dikarenakan banyaknya perumahan yang bekerja tetap dan sebagai pengusaha.

Berdasarkan penelitian ada beberapa peneliti meneliti tentang Implementasi kebijakan data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat bantuan social yaitu penelitian:

Penelitian Dian Amalina (2018), penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan rumah tangga di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang belum berjalan dengan efektif dengan nilai skor rata-rata 12,58. Tingkat pengeluaran rumah tangga keluarga penerima manfaat berkurang sebesar rata-rata 8,12% setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai. Serta tidak terdapat hubungan positif antara efektivitas program BPNT dengan Tingkat pengeluaran pangan rumah tangga keluarga penerima manfaat.⁽¹¹⁾

Penelitian Zulbaidah (2020) tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hasil kajian menunjukkan bahwa efek samping dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa selama ini program BPNT

sangat bermanfaat dalam menghimpun kebutuhan pangan keluarga tertindas. Kemudian, pada saat itu, selama pandemi Covid-19, banyak keluarga yang di-PHK dan sulit untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, dengan kejadian ini otoritas publik memilih untuk memberikan bantuan tambahan dari Rp. 110.000 menjadi Rp. 200.000 setiap bulan. Disesuaikan oleh BPNT, keluarga penerima diperbolehkan untuk memilih apa yang mereka butuhkan. Kendala dari program BPNT adalah pada upaya pemerolehan informasi kependudukan, di mana otoritas publik akan memberikan bantuan BPNT kepada individu yang telah terdaftar di Dinas Sosial yang prasyarat mendasarnya adalah penduduk kota Blang Oi, dan berbagai pencegah selama ini. Dibelanjakan untuk memberikan persediaan produk, yang terjadi tanpa pamrih, individu diperbolehkan untuk memilih kebutuhan sehingga beban sebagian bahan paha habis dan akan didapat minggu depan atau pada jam bantuan sosial berikutnya⁽¹²⁾

Penelitian Basriati (2021) menganalisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana penghibur telah dilakukan secara tepat dan ekonomis, khususnya sebelum pengiriman program BPNT melalui E-Warong di Kabupaten Parangloe dan sosialisasi bulan ke bulan oleh pihak teman untuk tujuan pertemuan. Melaksanakan Karakteristik; Cara paling umum dalam menjalankan strategi BPNT di Kabupaten Parangloe sudah ideal dan dirasakan oleh daerah setempat. Meski demikian, perilaku para ahli pelaksana dalam pendampingan sebenarnya harus ditingkatkan. Kondisi sosial,

moneter dan politik; keadaan sosial masih buruk dengan alasan masih ada beberapa penghuni yang masih awam sehingga dalam mengelola pertukaran program BPNT mengalami kendala. Untuk kondisi keuangan daerah tetap bisa dikatakan stabil dan kondisi politik di Indonesia juga tidak mengalami kendala. Sikap atau mentalitas agen; praktisi bahwa pertemuan-pertemuan tersebut termasuk memberikan reaksi yang layak terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuannya dengan tepat. Dalam penelitian ini, peneliti sangat tertarik mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.⁽¹³⁾

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Bagaimana Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program Bantuan Sosial serta mengetahui dampak yang ditimbulkan dari program bantuan Sosial di wilayah kelurahan Kecamatan Banyumanik karena program Bantuan Sosial ini merupakan pembaruan dari program raskin dan program rastra.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.5 . Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu administrasi publik secara umum kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat

Bantuan Sosial Di Kecamatan Banyumanik Banyumanik Kota Semarang.

2. Secara praktis

Dapat bermanfaat bagi para pembaca, masyarakat, pemerintah dan sebagai koreksi sejauh mana program Bantuan Sosial berhasil dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu di Kecamatan Banyumanik Semarang.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu mempunyai fungsi memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari penelitian sebelumnya di bawah ini membantu sebagai acuan mendasari penelitian yang akan dilakukan dirangkum kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Penelitian Zulbaidah (2020), Jurnal Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Banda Aceh, Judul Penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial. bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantudalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudiandisaat pandemin Covid-19 ini banyak kepala keluarga yang di Pemutusan HubunganKerja (PHK) kemudian sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,dengan kejadian ini pemerintah memutuskan member kenaikan bantuan yang dulunyaRp 110.000 menjadi Rp 200.000 perbulannya. Diprogram BPNT ini juga para Keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan yang diinginkan. Hambatan dari program BPNT ini dalam proses pendataan penduduk yang mana pemerintah akan member memberikan bantuan BPNT kepada masyarakat yang telah

mendaftar di Dinas Sosial yang syarat utamanya penduduk asli gampong Blang Oi, dan hambatan lainnya dalam proses penyediaan stok barang, yang mana terjadi bebas masyarakat bebas memilih kebutuhannya jadi stok beberapa bahan pahalannya habis dan akan didapatkan diminggu berikutnya atau pada saat pengambilan bansosnya selanjutnya.

2. Penelitian Basriati (2021), Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makasar. Tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warung di Kecamatan Parangloe dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik Pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Parangloe sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan

nstabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya.

3. Penelitian Faraz V Sahidi, Chantel Rapjad (2019), Jurnal Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, 155 College St, Toronto, ON, M5T 3M7, Canada, Tentang *The impact of social assistance programs on population health: a systematic review of research in high-income countries*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa bantuan sosial dikaitkan dengan hasil kesehatan yang merugikan dan bahwa penerima bantuan sosial menunjukkan hasil kesehatan yang lebih buruk dibandingkandengan bukan penerima . Empat studi eksperimental dan kuasi-eksperimental.
4. Penelitian Widiyaningrum (2020), Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Bandung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan PKH atau siapa saja yang berhakmenerima KPM yang sesuai dengan 7 (tujuh) kriteria penerima KPM dengan Komponen Kesehatan (ibu hamildan anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam tahun), Komponen Pendidikan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat), dan

Komponen Kesejahteraan Sosial (lanjut usia 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas), di luar dari kriteria tersebut tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dari PKH. Selain itu, Para pendamping PKH harus sudah tersertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian sosial untuk melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan kegiatan P2K2 salah satunya melalui modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha bisa terlaksana dengan baik dalam mengatur uang yang sudah diterima dengan merubah pola pikir apakah uang tersebut itu untuk kebutuhan atau keinginan.

5. Penelitian Helvie Gultom (2020), Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Tentang Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistic.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zulbaidah (2020) ⁽¹²⁾	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial <i>Sumber:</i> Universitas Muhamadiyah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini program Bantuan Sosial sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu.
Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian Zulbaidah tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.			

Tabel 2.2

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Basriati (2021) ⁽¹³⁾	Implementasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. <i>Sumber :</i> Jurnal Program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik.
Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian Basriati tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang			

Tabel 2.3

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Faraz V Sahidi, Chantel Rapjad (2019) ⁽¹⁴⁾	<i>The impact of social assistance programs on population health: a systematic review of research in high-income countries</i>	Bahwa bantuan sosial dikaitkan dengan hasil kesehatan yang merugikan dan bahwa penerima bantuan sosial menunjukkan hasil kesehatan yang lebih buruk

		Sumber: Jurnal PMID: 30606263	dibandingkan dengan bukan penerima . Empat studi eksperimental dan kuasi-eksperimental,
			semuanya dinilai kuat (n = 4), menemukan bahwa upaya untuk membatasi penerimaan bantuan sosial atau mengurangi kedermawanannya (juga dikenal sebagai reformasi
<p>Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian Faraz V Sahidi, Chantel Rapjad tentang <i>The impact of social assistance programs on population health: a systematic review of research in high-income countries</i></p> <p>Sedangkan penelitian yang sekarang adalah Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang</p>			

Tabel 2.4

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Widiyaningrum (2020) ⁽¹⁵⁾	<p>Implementasi kebijakan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) oleh dinas sosial di kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung</p> <p>Sumber : Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 46, No. 2, Oktober 2020: 396 - 407</p>	<p>Masyarakat mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan PKH atau siapa saja yang berhak menerima KPM yang sesuai dengan 7 (tujuh) kriteria penerima KPM dengan Komponen Kesehatan (ibu hamil dan anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam tahun), Komponen Pendidikan (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat), dan Komponen Kesejahteraan Sosial (lanjut usia 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas), di luar dari kriteria tersebut tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dari PKH. Selain itu, Para pendamping PKH harus</p>

			<p>sudah tersertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian sosial untuk melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan kegiatan P2K2 salah satunya melalui modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha bisa terlaksana dengan baik dalam mengatur uang yang sudah diterima dengan merubah pola pikir apakah uang tersebut itu untuk kebutuhan atau keinginan</p>
<p>Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian Widiyaningrum tentang Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung.</p> <p>Sedangkan penelitian yang sekarang adalah Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang</p>			

Tabel 2.5

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Helvie Gultom (2020) ⁽¹⁶⁾	Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik
<p>Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian Helvie Gultom tentang Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara</p> <p>Sedangkan penelitian yang sekarang adalah Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang</p>			

2.2 . Kajian Pustaka

2.2.1 Lingkup Kebijakan Publik

Cakupan penyelidikan pengaturan publik sangat luas mengingat mencakup berbagai bidang dan bidang seperti masalah keuangan, masalah pemerintahan, sosial, budaya, hukum, dll. Selanjutnya dilihat dari ketertiban, strategi publik bersifat publik, teritorial dan lingkungan seperti undang-undang, undang-undang tidak resmi, pedoman resmi, pedoman gerejawi, undang-undang tidak resmi lokal / umum, pilihan perwakilan pemimpin, pedoman provinsi wilayah / kota, dan pilihan pejabat / ketua. Sejauh kata-kata, pentingnya strategi publik (penataan publik) akhirnya menjadi banyak, bergantung pada titik mana kita menguraikannya. Secara umum, istilah strategi atau strategi digunakan untuk menyebut perilaku seorang entertainer (misalnya otoritas, perkumpulan, atau lembaga administrasi) atau berbagai entertainer dalam bidang aksi tertentu ⁽¹⁷⁾ Kita dapat menggunakan pemahaman strategi semacam ini dan cukup memuaskan untuk diskusi biasa, namun menjadi tidak cukup untuk percakapan yang logis dan tepat sehubungan dengan investigasi pendekatan publik.⁽¹⁸⁾

Salah satu makna pendekatan publik dikemukakan oleh Eyestone dalam ⁽¹⁹⁾ bahwa strategi publik secara “luas” dapat dicirikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintahan dengan keadaannya saat ini”. Pendekatan publik dapat mencakup banyak hal. Satu lagi kendala dalam pendekatan terbuka diberikan oleh Dye dalam yang mengatakan bahwa

"strategi publik adalah apa pun yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan dan tidak dilakukan" meskipun sejauh mungkin dipandang cukup cocok, namun pembatasan ini tidak cukup untuk memberikan kualifikasi yang masuk akal antara apa yang dipilih oleh otoritas publik untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh otoritas publik. Selain itu, ide ini dapat menggabungkan kegiatan, misalnya, merekrut perwakilan baru atau mengizinkan lisensi.⁽²⁰⁾

Suatu pendekatan secara konsisten memiliki alasan. Berkenaan dengan tujuan tersebut, setiap substansi pengaturan publik diandalkan untuk selalu bernilai guna memenuhi kepentingan individu. Hanya saja dalam hal manfaat, setiap pendekatan terbuka memberikan berbagai keuntungan pada pertemuan lokal yang berbeda. Keuntungan terbaik dari strategi publik pada umumnya akan dinikmati oleh para penggagas pendekatan terbuka. Dengan memulai pengembangan pemrakarsa perencanaan "siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana". Keajaiban ini bisa disinggung sebagai isu pemerintahan strategi terbuka.⁽²¹⁾

Dalam konteks kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau instansi pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Misalnya, ketika pemerintah mengesahkan UU No. 22 Tahun 1999, nilai-nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintah daerah. ⁽²²⁾ Kebijakan publik harus memuat tujuan, nilai, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Artinya kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat. ⁽²³⁾

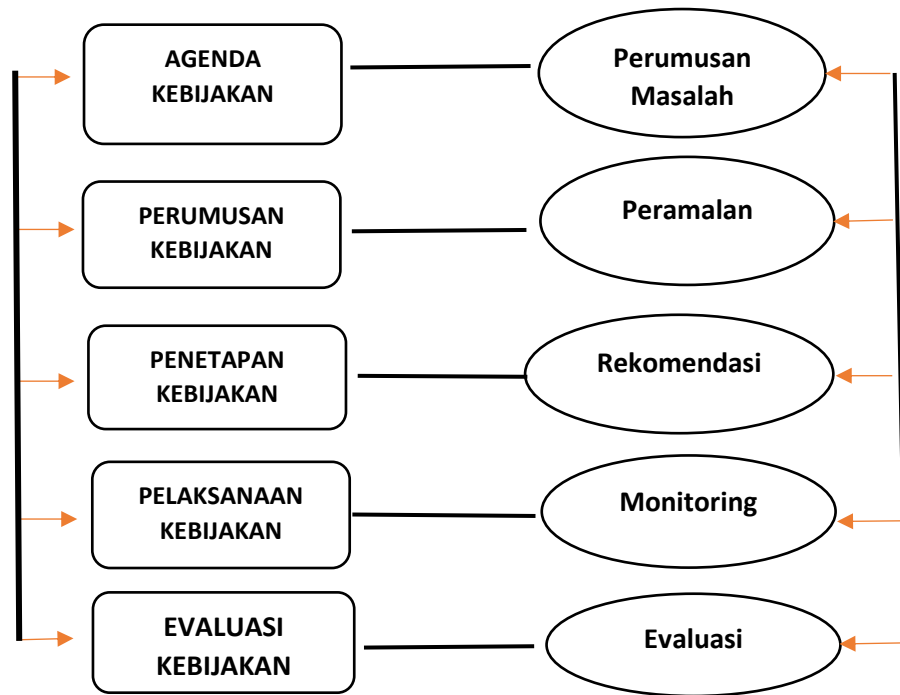
Ketika kebijakan publik mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan menghadapi resistensi ketika diimplementasikan. Di sisi lain, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodir nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang di masyarakat. Cakupan kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Selain itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota ⁽²⁴⁾.

2.2.2. Teori dan Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas

perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual

Gambar 2.1
Proses Kebijakan Publik



Sumber : afiqrokhman,2014)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
2. *Forecasting* (Peramalan) : Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3. Rekomendasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
4. Monitoring Kebijakan : Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Evaluasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai kinerja

Model pendekatan dapat dirangkai menjadi beberapa klasifikasi tergantung pada pelaksanaan, perluasan, pengelolaan, dan masalah⁽²⁵⁾

- a. Berdasarkan pelaksanaannya

Dalam prakteknya, contoh strategi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu contoh dasar dan contoh demonstratif. Contoh pendekatan sosial dasar adalah strategi sosial terpadu, yaitu, semua tujuan ramah, jenis, sumber, dan ukuran administrasi sosial telah didikte oleh otoritas publik. Strategi seperti itu menyinggung gagasan regulasi sosial yang diungkapkan oleh Dye ⁽²⁶⁾: “Pendekatan sosial berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah, kapan mereka melakukannya, dan perbaikan apa yang dibuatnya.” penglihatan normal dan kerinduan di seluruh area lokal. Otoritas publik umumnya hanya memutuskan strategi yang fokus pada tata ruang, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh daerah atau badan

swasta (organisasi non-legislatif atau asosiasi sosial). Pengaturan sosial yang khas sering disinggung sebagai strategi sosial partisipatif.

Pilihan model kebijakan imperatif dan indikatif ditentukan tidak hanya oleh sistem politik negara yang bersangkutan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan dana, serta berfungsinya mekanisme pasar. Di negara-negara berkembang, yang tingkat kesejahteraan sosialnya masih rendah dan mekanisme pasar yang belum berjalan optimal, masalah kebijakan sosial masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelesaian masalah sosial massal seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

b. Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya

Dilihat dari ruang lingkungannya dikenal model universal dan model selektivitas. Contoh universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan sosial. Pelayanan sosial diberikan kepada setiap orang atau setidaknya-tidaknya semua orang dalam kelompok tertentu, tanpa dibatasi oleh kemampuan dan karakteristik tertentu. ⁽²⁷⁾

Berbeda dengan contoh universal, contoh selektivitas menyatakan bahwa layanan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, yaitu mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan layanan tertentu. Syarat utama untuk memperoleh pelayanan biasanya ditentukan atas dasar “ketidakmampuan” yang umumnya dilihat dari aspek pendapatan. Masyarakat yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, orang tua terlantar, anak terlantar yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara kuat adalah mereka yang dianggap layak menjadi sasaran kebijakan sosial. Baik dalam bentuk asuransi maupun bantuan sosial.

c. Berdasarkan keajegan atau keberlanjutannya

Contoh residual dan contoh institusional adalah dua model kebijakan sosial yang dilihat dari keberlanjutan atau keteguhan pelayanan sosial. Manusia normal secara alami akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kekuatan sendiri dan dengan dukungan institusi primer dan alam, yaitu keluarga dan pasar.⁽²⁸⁾

2.2.3 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bansos dapat diberikan secara langsung kepada

masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu :

- 1) Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.
 - 2) Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
 - 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
 - 4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT ⁽²⁹⁾
- d. Berdasarkan jenis permasalahan atau sarannya

Berdasarkan jenis masalahnya, kebijakan sosial dapat dikelompokkan menjadi model kategoris dan model komprehensif. Kebijakan sosial kategoris adalah kebijakan yang hanya terfokus pada

penanganan suatu masalah sosial berdasarkan suatu sektor masalah tertentu. Kebijakan sosial di bidang pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan adalah contoh dari kebijakan sosial kategoris. Berbeda dengan contoh kategoris yang bersifat spesifik dan parsial, contoh komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu masalah wilayah, tetapi beberapa masalah sosial terkait diatur dan dirumuskan secara terpadu dalam satu rumusan kebijakan sosial yang terpadu (Suharto, 2015).

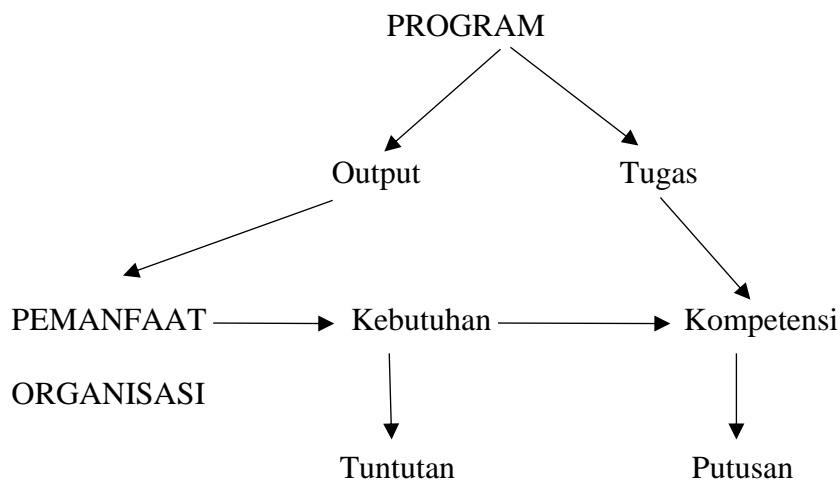
2.2.4. Konsep Implementasi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam ⁽³⁰⁾ menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones⁽³¹⁾ ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

- a. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal

kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten.

Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12) ⁽³²⁾

Korten menggambarkan model ini berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

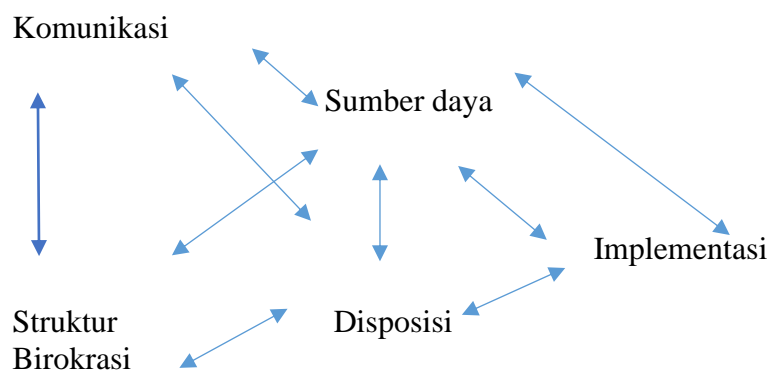
Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Tuntutan Putusan Program Pemanfaat Organisasi Output Tugas Kebutuhan Kompetensi yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. (33)

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh

karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2.2.5. Model Implementasi

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut. ⁽³⁴⁾, George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi⁽³⁵⁾



Gambar 1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam ⁽³⁶⁾ komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dala ⁽³⁷⁾ perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa

yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam⁽³⁸⁾ komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Implementasi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Edward III dalam ⁽³⁹⁾mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam ⁽⁴⁰⁾ Widodo bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”

b. Sumberdaya Anggaran III menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the*

failure of the program”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward III menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III menyatakan:

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.

d. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan.

Menurut Edward III dalam menyatakan bahwa:

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi

penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”., “*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III menyatakan bahwa:

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

Edward III menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

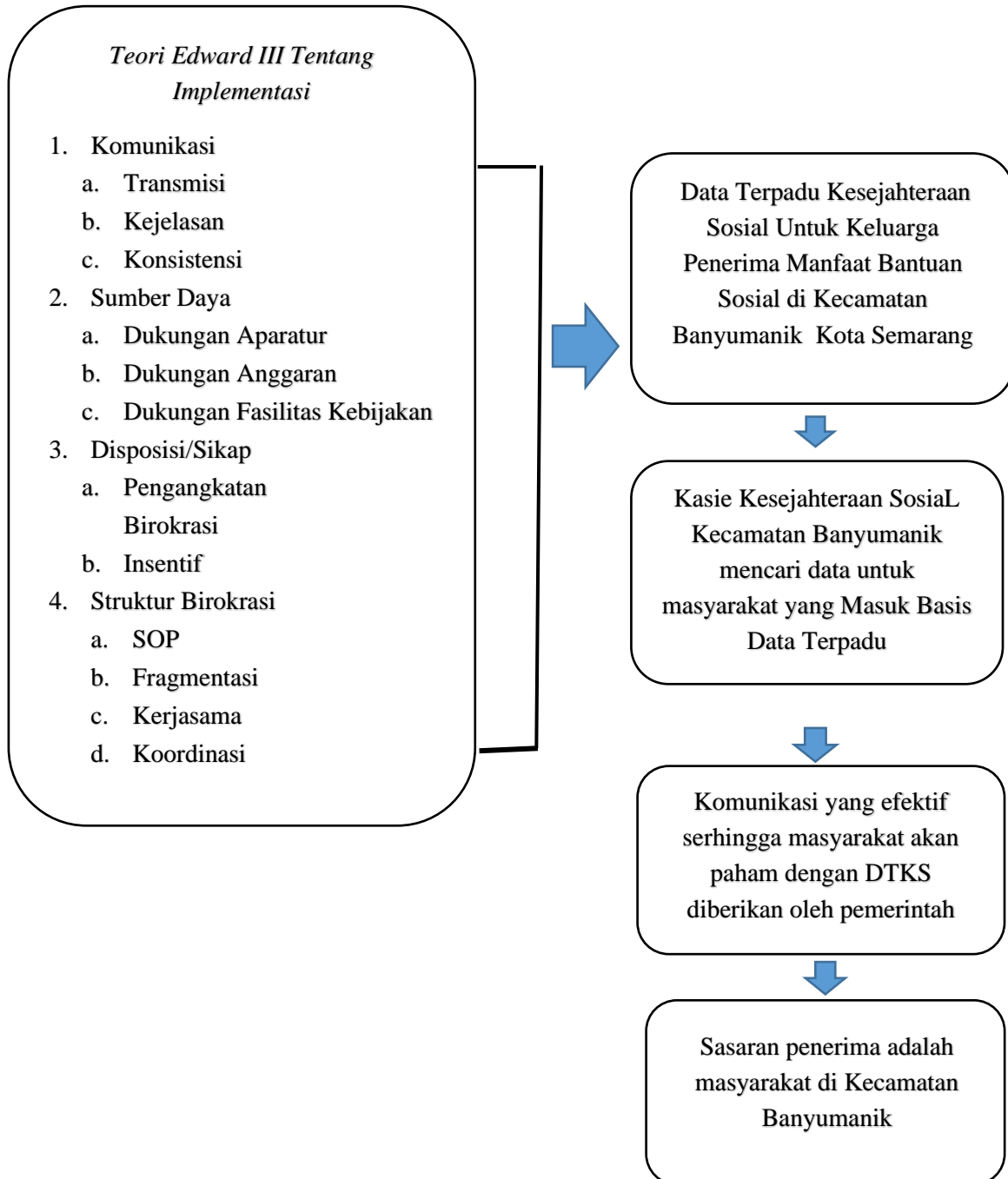
2.3. Kerangka Pemikiran

Suharsimi (2018) ⁽⁴¹⁾ mengemukakan bahwa kerangka kerja adalah contoh konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka kerja yang baik akan menjelaskan secara teoritis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, teori yang akan digunakan dalam pelaksanaan ini adalah teori Edward III dimana pelaksanaannya adalah berdasarkan empat variabel yaitu Komunikasi,

Sumberdaya, sikap/disposisi dan struktur organisasi. Berdasarkan uraian di atas, kerangka kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Teori (diolah peneliti,2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis⁽⁴²⁾ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian menurut ⁽⁴³⁾ ada beberapa metode penelitian :

- a. Metode Eksploratif, adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu obyek secara relatif.
- b. Metode Eksplanatori, adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel.
- c. Metode Deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya secara mendalam. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.
- d. Metode Penelitian Evaluasi, adalah penelitian bertujuan menilai sesuatu dengan cara membandingkannya dengan suatu patokan atau standar.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif dengan penjelasan secara kualitatif. Deskriptif karena peneliti hanya semata-mata ingin melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa bermaksud

mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistic. Menurut Sugiyono (2018) yaitu bahwa :

“ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.“

3.2 . Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. JL. Prof.Sudarto Nomor 113 Semarang.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat terkait dengan permasalahan (perumusan masalah), oleh karena itu fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang gambaran di lapangan dan topik pokok yang akan digali, walaupun fokus terkadang dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang di temukan di lapangan. Fokus pada penelitian ini adalah : Teori Implemtasi kebijakan Publik Edward 3 yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sebelum pengumpulan data perlu diperhatikan macam-macam apa yang diperlukan, dimana diperoleh data, bagaimana cara memperolehnya serta jumlah yang tepat. Karena pada dasarnya penelitian ini yang penting adalah dalam data yang diperoleh dari sumber data yang diharapkan.

Menurut ⁽⁴⁴⁾ adapun pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Angket terbuka adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain. Angket terbuka untuk penelitian kualitatif umumnya tidak berstruktur artinya kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan, yang jawabannya ditentukan oleh responden tanpa perlu campur tangan peneliti.

b. Wawancara mendalam

Wawancara ada dua jenis :

1). Wawancara relatif berstruktur adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan disertai alternatif jawabannya namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban.

2). Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas, peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar subjek secara bebas.

c. Observasi partisipan

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data, untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen (pedoman observasi), pedoman observasi biasanya dalam bentuk *chek list* atau daftar isian.

d. Format-format

Format biasanya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data lapangan atau jumlah kelompok subjek tertentu, data yang dijarah melalui format merupakan data penunjang bukan data utama.

Misalnya memproyeksikan data tertentu mengetahui komposisi suatu objek (komposisi penduduk, menurut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, penghasilan, status sosial).

3.5. Penentuan Informan

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif sehingga penulis tidak menggunakan populasi dan sampel. Menurut ⁽⁴⁵⁾ menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang digunakan adalah pengaturan. Hasil penelitian hanya berlaku untuk setting yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ⁽⁴⁶⁾ yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan

populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus-kasus penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif sehingga penulis tidak menggunakan populasi dan sampel.

Menurut ⁽⁴⁷⁾ menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang digunakan adalah pengaturan. Hasil penelitian hanya berlaku untuk setting yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ⁽⁴⁸⁾ yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang ada dalam situasi sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut tidak akan diterapkan pada populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain dalam suatu situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial dalam kasus yang diteliti.

Penelitian ini hanya menggunakan informan karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut ⁽⁴⁹⁾ menyatakan bahwa “cara memperoleh informan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *snowballing sampling* dan *key person*”. Perolehan informan dengan cara *snowballing sampling* digunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa yang memahami informasi dari objek penelitian, sedangkan metode memperoleh informan dengan cara *key person* digunakan jika peneliti telah memahami informasi awal tentang objek penelitian. dan informan penelitian, sehingga membutuhkan seorang *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *Key person* adalah karakter formal atau informal.

Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus dilema tersebut sehingga penulis dapat merangkum informasi penting dalam fokus penelitian :

1. Sekretaris Kecamatan Banyumanik
2. Kepala Seksi Sosial Kecamatan Banyumanik
3. Tokoh Masyarakat
4. PSM (petugas sosial masyarakat)
5. Petugas IT

3.6. Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Bogdan ⁽⁵⁰⁾ mendefinisikan pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen adalah mencakup :

1. *Responsif*, manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.

2. Dapat menyesuaikan diri, manusia sebagai instrument hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
3. Menekankan keutuhan, manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan.
4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sebagai instrumen penelitian terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
5. Memproses data secepatnya.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik, manusia sebagai instrument memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak tidak lazim terjadi.

Disamping peneliti sebagai instrumen, juga memanfaatkan instrumen penunjang lainnya seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi yang dapat melengkapi kekurangan instrumen berdasarkan peneliti.

3.7 Sumber Data

Yang dimaksud dari sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Sebelum penelitian berhasil mencapai sasarannya, maka data-data yang diperoleh harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh sedangkan berpedoman dari keterangan diatas maka di dalam penelitian ini mengambil sumber data antara lain disebutkan dibawah ini :

Sumber data primer. Yaitu untuk memperoleh sumber data pokok, dimana diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi atau pengamatan. Adapun yang termasuk dari data primer dalam penelitian ini adalah informan yaitu dari pengambil (*proveder*) penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik.

Sumber data sekunder. Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, buku di perpustakaan, dokumen-dokumen, wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti dalam mengkoleksi data melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinyu dengan informan dan dalam setting yang wajar. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang diharapkan mampu menjelaskan pendapat, keyakinan serta sikap informan terhadap kondisi

atau keadaan yang alami dan observasi sebagai upaya untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian-kejadian yang dijelaskan atau terletak dari hasil wawancara dengan informan.

Menurut ⁽⁵¹⁾ Informan merupakan orang-orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan target adalah individu yang bekerja atau masih menjalin hubungan (interaksi) dengan pegawai pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang berkompeten di DTKS.

3.8. Analisa Data

Data dalam penelitian ini dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Hal ini senada dengan pernyataan Chaterine Marshall, dan Gretvhen B. Rossman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwa:

“The fundamental methods relied on by qualitative research or gathering information are, participation in the setting, direct observation, in depth interviewing, document review”.

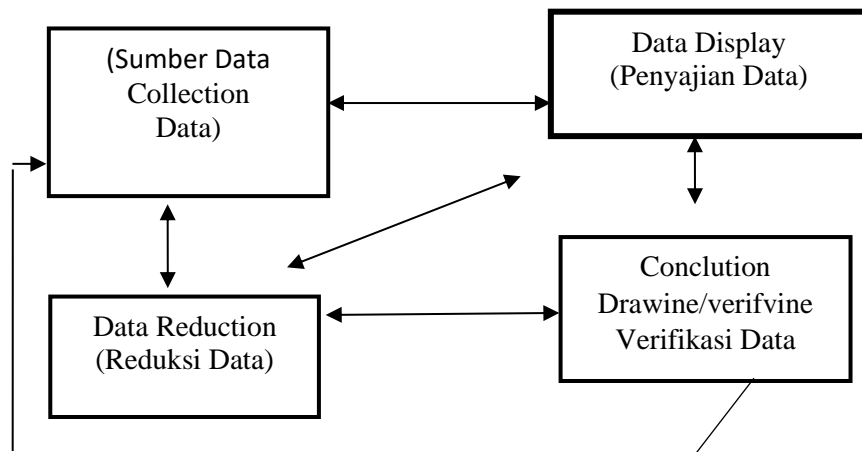
Dari paparan diatas dapat diartikan metode yang pokok dari penelitian kualitatif untuk pengumpulan informasi, aturan pengambilan bagian, observasi secara langsung, *interview* secara dalam, tinjauan buku.

Adapun dalam penelitian ini analisa data bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

1. Observasi adalah metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap hal-hal atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dengan harapan data yang diperoleh dapat diterapkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi yang dilakukan.
2. Wawancara (*interview*) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah percakapan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi digunakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Proses analisa data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles dan Huberman (1984). Yang pada dasarnya meliputi tiga alur kegiatan setelah proses pengumpulan data yaitu : reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Namun, analisa data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Proses Analisa Data



Sumber : Miles dan Huberman (1984) ⁽⁵²⁾

1. Reduksi data (*data reduction*), suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*), dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memeberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah bentuk naratif, bentuk matriks, grafik dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing and verification*), peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada.

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Menurut ⁽⁵³⁾ proses analisis data dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Analisis data sebelum di lokasi penelitian, dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data selama di lokasi penelitian, dilakukan selama di lapangan, peneliti akan memperoleh jawaban langsung yang jawabannya dipandang sudah relevan, memuaskan dan cukup

sehingga peneliti dapat terus menggali informasi selama masih dibutuhkan sebagai bahan analisisnya.

3. Analisis setelah selesai penelitian di lapangan, dilakukan dengan berbagai pendekatan terutama dalam menafsirkan isi data yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan berdasarkan pendekatan metode kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian deskriptif terhadap data-data yang berasal dari hasil wawancara berstruktur dan bebas serta hasil observasi. Kemudian demi keabsahan data yang telah didapatkan tersebut maka dilakukan pemeriksaan keabsahan atau verifikasi.

Menurut Poerwandari ⁽⁵⁴⁾, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, dan lain-lain:

Keabsahan Data. Dalam setiap penelitian diperlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap penelitian, dimana dalam penelitian yang bersifat kualitatif standarisasi tersebut sering diartikan sebagai keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, yang diguna untuk keperluan silang dan perbandingan terhadap data yang ada. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan (*trustworthiness*) data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, kebergantungan, kepercayaan data, keteralihan, kepastian dan triangulasi

(pemeriksaan atau pengecekan ulang data dengan data lainnya).

membedakan triangulasi sebagai teknik dalam pemeriksaan data yang memanfaatkan dengan penggunaan sumber, metode, teori/kepuustakaan dan penyidik atau pakar sebagai berikut :

- a. Triangulasi teori atau kepuustakaan, dilakukan dengan memperhatikan, memahami, memperbandingkan data, mengintreprestasikan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara dengan informan. Serta memeriksa hasil interprestasi data dengan teori atau kepuustakaan dan hasil penelitian lain yang dijadikan rujukan.
- b. Triangulasi data dengan sumber atau data, dilakukan dengan membandingkan dan memahami terhadap apa-apa yang dibicarakan atau dikatakan orang di hadapan halayak atau dimuka umum dengan apa-apa yang disampaikan atau dibicarakan orang di internal. Serta membandingkan, memahami dan menginterpretasikan keadaan atau situasi daeah penelitian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh orang dan mengkonfermasikan data sekunder dan data primer.
- c. Triangulasi data dengan para penyidik atau para pakar, dilakukan dengan membandingkan pernyataan seseorang dengan berbagai pendapat umum dan pendapat atau analisis pakar sesuai dengan masalah dalam penelitian, dan membandingkan hasil pengamatan, wawancara dan data sekunder yang ada dengan kondisi riil atau kondisi nyata.

Yin⁽⁵⁵⁾ mengajukan 4 kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

a. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*), bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukuran benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai tehnik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

- 1) Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- 2) Triangulasi Pengamat, adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.
- 3) Triangulasi Teori, penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

- 4) Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.
- b. Keabsahan Internal (*Internal validity*), merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.
- c. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*), mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Meskipun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.
- d. Keajegan (*Reabilitas*), merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data. Sedangkan triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berlainan.

3.9 Jadwal Penelitian

Gambar 3
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023	Juni 2023
1.	Perencanaan				
2.	Penyusunan Proposal				
3.	Penelitian				
4	Penyusunan Hasil Penelitian				

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Semarang

4.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak diantara 109^o 35' – 110^o 50' Bujur Timur dan 6^o 50' – 7^o 10' Lintang Selatan. Dengan luas 373,70 Km², Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
3. Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal



Gambar 4.1 Peta Kota Semarang Sumber : Bapeda Kota Semarang, 2022

4.1.2 Topografi Kota Semarang

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 – 15 %, daerah perbukitan merupakan kawasan dibagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 230 C sampai dengan 340 C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Kota Semarang dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron. Sebagai Daerah Hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debiet air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik kontur wilayah berbukit dengan perbedaanketinggian yang sangat curam sehingga curah hujan yang terjadi di daerah hulu akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir.

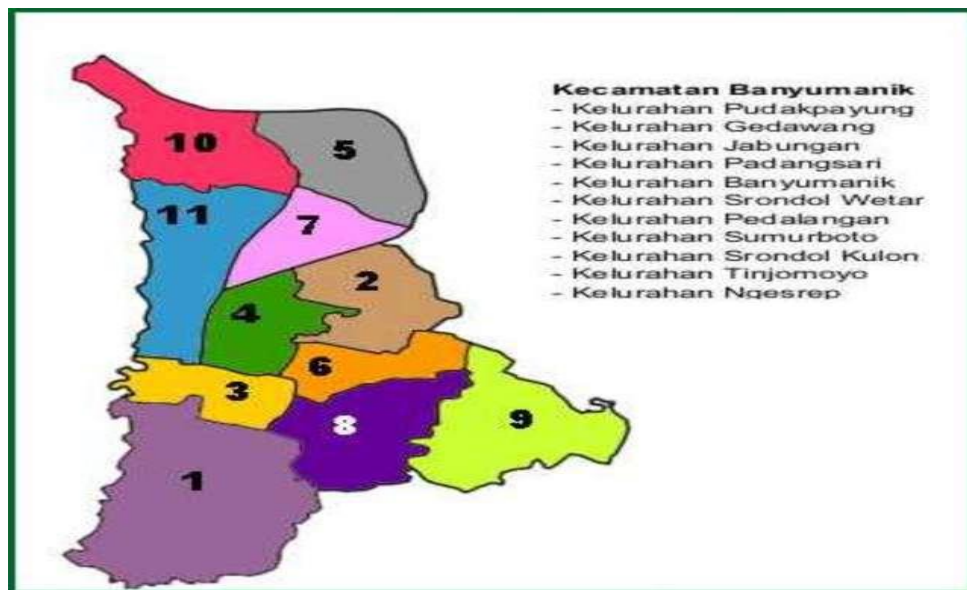
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Banyumanik

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang. Terletak di bagian selatan dengan jarak sekitar 10,2 km dari Ibukota Kota Semarang, secara geografis pada posisi $110^{\circ} 23' 49''$ hingga $110^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 1' 22''$ hingga $7^{\circ} 6' 50''$ Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Banyumanik adalah Daerah perbukitan dan termasuk kawasan pemukiman dan tempat perdagangan, dengan luas Ha, terdiri atas 86,05 hektar (3,36 persen) untuk lahan sawah, 1759,70 hektar (68,71 persen) untuk pekarangan/ perumahan, 553,44 hektar (21,61 persen) untuk tegal/kebun, 59,16 hektar (2,31 persen) untuk tanah gembala/ padang rumput, dan 102,70 hektar (4,01 persen) untuk tanah kering lainnya.

- Sebelah Utara : Berbatasan Kecamatan Candisari
- Sebelah Timur: Berbatasan Kecamatan Tembalang
- Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Berbatasan Kecamatan Gunungpati
- Ketinggian Tanah dari Permukiman laut: ± 250 m
- Curah Hujan: 2000-3000 mm / th
- Suhu udara rata-rata: 20 – 30 C

Topografi wilayah Kecamatan Banyumanik merupakan dataran dengan kontur dan ketinggian beragam. Kantor kelurahan berada pada ketinggian 200—300 MDPL, Kelurahan dengan ketinggian terendah berada pada Kelurahan Tinjomoyo yaitu 200 MDPL Kelurahan dengan ketinggian seperti kelurahan Pudukpayung, Gedawang, Jabungan, Banyumanik, Srandol

Wetan, Sumurboto, dan Srodol Kulon yang berada pada ketinggian 300 MDPL yang memiliki suhu udara relatif lebih sejuk. Pada Tahun 2021 terjadi bencana alam berupa tanah longsor sebanyak 6 kejadian, tetapi tidak memakan korban jiwa. Kecamatan Banyumanik terbagi dalam 11 Kelurahan dengan Kelurahan Pudukpayung sebagai kelurahan terluas dengan luas wilayah 392,93 Ha atau 15,34 persen dari luas kecamatan. Sedangkan kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Sumurboto dengan luas wilayah 84,54 Ha / 3,30 persen



Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Banyumanik.

Sumber : Monografi Kecamatan Banyumanik,2022

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Semarang, yang diresmikan pada tanggal 17 April 1993 oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah No.50 Tahun 1992 yang antara lain berisi penataan wilayah di Kota Semarang.

4.1.4 Luas Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Luas wilayah Kecamatan Banyumanik yang terdiri dari 11 Kelurahan adalah pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Data luas wilayah dan jumlah RT dan RW di setiap kelurahan

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km)	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Pudakpayung	3,93	16	141
2	Gedawang	2,37	10	64
3	Jabungan	2,26	6	29
4	Pedalangan	2,35	11	68
5	Padangsari	0,78	17	98
6	Banyumanik	3,64	10	53
7	Srondol wetan	2,26	18	130
8	Srondol kulon	2,88	11	65
9	Sumurboto	0,84	5	46
10	NgesreP	2,36	11	82
11	Tinjomoyo	2,02	8	46
	Jumlah	25,69	123	822

Sumber : Data Monografi Semesteran, Kecamatan Banyumanik, 2022

Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 kelurahan yaitu kelurahan Pudakpayung, Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Padangsari,

Pedalangan, Srandol Wetan, Srandol Kulon, Sumurboto, Ngesrep, dan Tinjomoyo. Kecamatan Banyumanik terbagi menjadi 123 rukun warga dan 822 rukun tetangga. Data setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel di atas.

4.1.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Tabel. 4.2

Data jumlah penduduk di Kecamatan Banyumanik

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK						JUMLAH WNI + WNA		
		WNI			WNA			WNA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PUDAKPAYUNG	12.759	12.328	25.087	3	2	5	12.762	12.330	25.092
2	GEDAWANG	5.020	5.000	10.020	1	0	1	5.021	5.000	10.021
3	JABUNGAN	2.148	2.061	4.209	0	0	0	2.148	2.061	4.209
4	PEDALANGAN	6.511	6.488	12.999	0	0	0	6.511	6.488	12.999
5	PADANGSARI	6.599	6.866	13.465	8	0	8	6.607	6.866	13.473
6	BANYUMANIK	6.263	6.353	12.616	0	0	0	6.263	6.353	12.616
7	SRONDOL WETAN	11.590	12.024	23.597	7	2	9	11.597	12.026	23.623
8	SRONDOL	7.213	7.115	14.328	15	8	23	7.228	7.123	14.351

No	Kelurahan	L	P	L+P	L	P	L	P	L	L+P
9	SUMURBOTO	5.226	5.314	10.540	55	26	81	5.281	5.340	10.621
10	NGESREP	7.387	7.512	14.899	89	61	150	7.476	7.573	15.049
11	TINJOMOYO	5.523	5.352	10.875	0	0	0	5.523	5.352	10.875
JUMLAH		76.239	76.413	152.652	178	99	277	76.417	76.512	152.929

Sumber : Data Monografi Semesteran, Kecamatan Banyumanik, 2022

Penduduk Kecamatan Banyumanik pada tahun 2022 baik WNA maupun WNI sebanyak 152.929 jiwa, jumlahnya naik dari tahun 2015 sebanyak 132.508 jiwa. Kenaikan ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Banyumanik. Apabila dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2022 penduduk laki-laki sebanyak 76.417 jiwa dan perempuan 76.512 jiwa. Data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di atas.

4.1.6 Visi dan Misi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Visi Kecamatan Banyumanik adalah “Menjadikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Banyumanik yang HEBAT”

H = Hati yang ikhlas,

E = Empati,

B = Budaya senyum dan ramah,

A = Akurat dan

T = Tepat waktu.

Misi Kecamatan Banyumanik adalah :

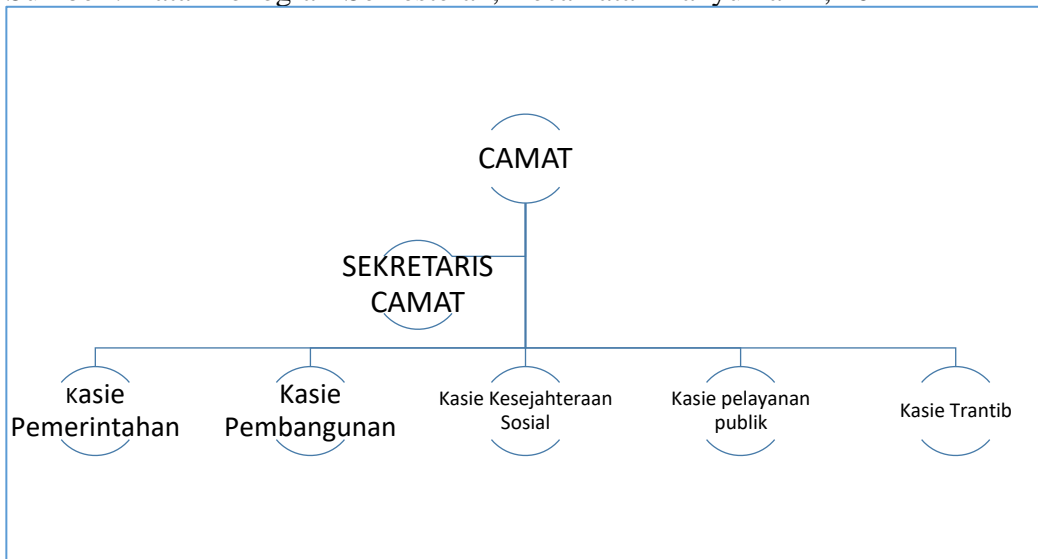
1. Meningkatkan sarana ruang pelayanan
2. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan yang profesional
3. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Gambaran mengenai struktur organisasi Kecamatan Banyumanik, dapat di lihat pada gambar di bawah ini

Gambar 4.3.

Struktur Organisasi Kecamatan Banyumanik

Sumber : Data Monografi Semesteran, Kecamatan Banyumanik, 2022



Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Semarang yang di kepalai oleh Camat dan dibantu oleh Sekretaris Camat dan 5 (lima) Kepala Sie antara lain : Kasie Pemerintahan, Kasie Pembangunan, Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Pelayanan Publik serta Kasie Keamanan dan Ketertiban. Sekretaris Camat

membawahi 2 (dua) Kasubag antara lain : Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubag perencanaan Keuangan dan Aset.

1. Tugas Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

2. Fungsi Camat

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 4 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
 - b. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - e. Penyelenggaraan kerjasama;
 - f. Penyelenggaraan sekretariat;
 - g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

- h. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sekretaris Camat

- a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan dan data untuk koordinasi Camat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkungan kecamatan;

- c. Menyusun dan merumuskan rencana program kerja kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah di kecamatan;
- e. Membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi teknis fungsional kegiatan Unit Pelaksana Teknis di kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan pada rumah tangga kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian;
- h. Menyelenggarakan tertib administrasi di lingkungan kecamatan meliputi surat-menyurat, ekspedisi, dokumentasi, dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas serta administrasi perjalanan dinas;
- i. Mengkoordinasikan pemilahan, penyaluran dan monitoring surat masuk dan surat keluar di lingkungan kecamatan;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan laporan keuangan, inventaris, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Daftar Rencana Kegiatan;
- k. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;

- l. Mempersiapkan bahan, data dan informasi serta laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Camat;
- m. Mewakili Camat dan/atau melaksanakan tugas Camat dalam hal Camat berhalangan;
- n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
- p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

masuk, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kependudukan dalam rangka persiapan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan sesuai peraturanperundang-undangan;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan teknis administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
- k. Menghimpun dan menyusun laporan administrasi kependudukan kecamatan dan data monografi kecamatan;

- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- o. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unitkerjanya.

4. Tugas Kepala Seksi Pembangunan

Tugas Kepala Seksi Pembangunan

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan teknis administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
- i. Menghimpun dan menyusun laporan administrasi kependudukan kecamatan dan data monografi kecamatan;
- j. Melaksanakan monitoring dan pencatatan pengelolaan kekayaan desa sesuai peraturanperundang-undangan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Kegiatan Seksi Pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;

- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unitkerjanya.

5. Tugas Kasie Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan kesejahteraan sosial.

- a. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tunawisma dan panti asuhan;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam;
- d. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
- e. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian rekomendasi izin pertunjukan pasar malam, keramaian dan usaha sosial lainnya;
- h. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya;

- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan/perburuhan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

6. Kasie Pelayanan Publik

Tugas Kasie Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Menyusun Standar Pelayanan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- j. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;

- k. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
- l. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
- n. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelayanan pada kelurahan;
- o. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Tugas Kasie Ketentraman dan Ketertiban

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan;
- d. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana;
- e. Membina kegiatan Pos Siskamling;
- f. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan;
- j. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;

- m. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

4.1.7 Cara Pendaftaran DTKS



Gambar 4.4 Cara Pendaftarkan DTKS

1. Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
2. Selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS
3. Hasilnya akan ditampilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya

4. Berita Acara kemudian digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga
5. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh Operator Desa/Kecamatan
6. Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati/Walikota
7. Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri

4.1.8 Kriteria yang tidak mendapatkan DTKS

Kriteris yang tidak mendapatkan DTKS adalah:

1. Anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/Anggota DPR/DPRD.
2. Rumah tangga memiliki mobil.
3. Rumah tangga memiliki tanah/lahan dan bangunan (dengan NJOP diatas Rp1 miliar),
4. Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek (tidak termasuk air isi ulang)
5. Dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat.

4.1.9 Gambaran Informan

Gambaran Informan Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1. Informan 1

Nama : Catur Edi Wardoyo,S.H
Alamat : JL Kawi No.57 Semarang
Jabatan : Sekretaris Camat Banyumanik

2. Informan 2

Nama : Cristiyannah Sri Adijati,S.E
Alamat : Potrosari Sronдол
Jabatan : Kepala Seksi Sosial Kecamatan Banyumanik

3. Informan 3

Nama : Sumardi
Alamat : Gombel Lama RT.04 RW.05
Jabatan : Tokoh Masyarakat

4. Informan 4

Nama : Dina Kristianingsih
Alamat : Jl. Gotongroyong Tinjomoyo
Jabatan : Petugas Sosial Masyarakat

5. Informan 5

Nama : Gita
Alamat : JL.Puspanjolo Nomor 67 Semarang
Jabatan : Petrugas IT Kecamatan Banyumanik

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Penulis menggunakan Teori George Edwarad III yaitu dengan indikator Komunisi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, dan Struktur Birokrasi. Maka masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1 Aspek Komunikasi

- a. Dimensi Transmisi pada Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah menghendaki agar kebijakan publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada kelompok (Implementor) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) pada Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kesimpulan tentang Komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan melakukan wawancara dengan 5 informan yaitu Bapak Catur Edi Wardoyo,S.H, selaku Sekretaris Camat Banyumanik Ibu Cristiyannah Sri Adiyati,SE, selaku Kasie Kesos Kecamatan Banyumanik, Bapak Sumardi , selaku tokoh masyarakat , Ibu Dina Kritiyaningsih, selaku Pekerja Sosial Masyarakat dan Gita Selaku petugas IT pelayanan dapat disimpulkan bahwa komunikasi berpedoman pada data induk yang berisi data untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat. Yang bertujuan untuk dijadikan data acuan dalam program penanganan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sudah masuk dalam data

terpadu dalam rangka untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Komunikasi dilaksanakan 1 x dalam satu bulan. Komunikasi dilakukan apabila penerima manfaat belum jelas cara pengambilannya. Bisa melaksanakan komunikasi sudah ada aturannya. Komunikasi yang dilakukan memberikan kejelasan tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam menerima bantuan sosial bagi penerima manfaat. Konsistensi petugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya. Komunikasi dilakukan 1 bulan sekali pelaksanaan sesuai dengan aturan.(Jawaban Informan pada lampiran 1)

4.2.1.2 Sumber Daya

Faktor sumber daya yang dimaksud disini adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu, ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara

sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan,

baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Kesimpulan tentang sumber Daya Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdasarkan wawancara dengan Bapak Catur Edi Wardoyo,S.H, selaku Sekretaris Camat Banyumanik Ibu Cristiyannah Sri Adiyati,SE, selaku Kasie Kesos Kecamatan Banyumanik, Bapak Sumardi, selaku tokoh masyarakat ,Ibu Dina Kritiyaningsih, selaku Pekerja Sosial Masyarakat dan Gita selaku petugas pelayanan dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya pada implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi yaitu adanya Kasie Kesejahteraan Sosial, Tokoh masyarakat, Petugas Sosial Masyarakat dan petugas IT kecamatan jadi jumlahnya 4 personil. Dukungan APBN dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah Laptop, Printer dan Daftar DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

4.2.1.3 Disposisi/Sikap

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang cukup optimal dengan menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan terkait pertemuan, pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk kedalam rekening masing-masing. Sikap pelaksana menentukan keberjalanan suatu program dengan karakter dan komitmen pelaksana dalam menjalankan suatu program kebijakan. Kasie Kesos Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menjalankan tugas sebagaimana sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni dalam pelaporan, monitoring, evaluasi dalam disposisi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memiliki karakter sesuai dengan arah kebijakan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, begitu juga dengan sikap dikarenakan Kasie Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Banyumanik Kota Semarang langsung turun dan memantau yang terjadi di lapangan dibuatlah komunikasi melalui platform chatting sehingga kebijakan tersebut dijalankan dengan responsif dan efektif.

Kesimpulan tentang Disposisi/Sikap pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdasarkan wawancara dengan Bapak Catur Edi Wardoyo,S.H, selaku Sekretaris Camat Banyumanik Ibu Cristiyannah Sri Adiyati,SE, selaku Kasie Kesos Kecamatan Banyumanik, Bapak Sumardi, selaku tokoh masyarakat ,Ibu Dina Kritiyaningsih, selaku Pekerja Sosial Masyarakat dan Gita Selaku petugas pelayanan dapat disimpulkan bahwa Disposisi /Sikap pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

4.2.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Manfaat Bantuan

Sosial. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam penetapan tim koordinasi pada pasal 44 ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, begitu juga selanjutnya diatur pada tingkatan kecamatan, dan kelurahan yang diatur masing-masing melalui Surat Keputusan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka Standar Operasional Prosedur (SOP) akan terlaksana dengan baik.

Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);

Vitalitas suatu organisasi;Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Kesimpulan tentang Struktur Birokrasi pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdasarkan wawancara dengan Bapak Catur Edi Wardoyo,S.H, selaku Sekretaris Camat Banyumanik Ibu Cristiyannah Sri Adiyati,SE, selaku Kasie Kesos Kecamatan Banyumanik, Bapak Sumardi, selaku tokoh masyarakat ,Ibu Dina Kritiyaningsih, selaku Pekerja Sosial Masyarakat dan Gita selaku petugas pelayanan dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standrat Operasional Pelayanan Standrat Operasional Pelayanan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama, NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.

4.2.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sikap yang antusias Keluarga Penerima Manfaat. Karena warga cukup jelas dan paham tentang penggunaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Kecamatan yang cukup besar sehingga bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pertemuan rutin. Peralatan Komputerisasi dari pihak Kecamatan yang sudah mencukupi untuk pendataan dan Keluarga Penerima Manfaat sebagian sudah mempunyai HP Android sehingga bisa masuk kedalam group WA .

4.2.2.2 Faktor penghambat

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah kadang sulit mengumpulkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Apabila KPM meninggal dunia maka tidak bisa otomatis digantikan oleh ahliwarisnya , ahli waris harus masuk dalam DTKS sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan. Kurangnya kesadaran warga tentang pengisian data yang sesuai keadaan, Pembiaran yang terjadi dimasyakat juga sangat disayangkan karena ada warga yang benar benar tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan warga sekita hanya diam saja.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Komunikasi berpedoman pada data induk yang berisi data untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat. Yang bertujuan untuk dijadikan data acuan dalam program penanganan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sudah masuk dalam data terpadu dalam rangka untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Komunikasi dilaksanakan 1 x dalam satu bulan. Komunikasi dilakukan apabila penerima manfaat belum jelas cara

pengambilannya. Bisa melaksanakan komunikasi sudah ada aturannya. Komunikasi yang dilakukan memberikan kejelasan tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam menerima bantuan sosial bagi penerima manfaat.

Sumber Daya pada implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi yaitu adanya Kasie Kesejahteraan Sosial, Tokoh masyarakat, Petugas Sosial Masyarakat dan petugas IT kecamatan jadi jumlahnya 4 personil. Dukungan APBN dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah Laptop, Printer dan Daftar DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Disposisi /Sikap pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingan bagi penerima manfaat

bantuan sosial. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Komitmen dalam Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Struktur birokrasi pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Standar Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama, NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.

Penelitian Zulbaidah (2020), Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial. bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian disaat pandemi Covid-19 ini banyak kepala keluarga yang

di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kemudian sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan kejadian ini pemerintah memutuskan memberikannya bantuan yang dulunya Rp 110.000 menjadi Rp 200.000 per bulannya. Di program BPNT ini juga para Keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan yang diinginkan. Hambatan dari program BPNT ini dalam proses pendataan penduduk yang mana pemerintah akan memberikannya bantuan BPNT kepada masyarakat yang telah mendaftar di Dinas Sosial yang syarat utamanya penduduk asli gampong Blang Oi, dan hambatan lainnya dalam proses penyediaan stok barang, yang mana terjadi masyarakat bebas memilih kebutuhannya jadi stok beberapa bahan paku habis dan akan didapatkan di minggu berikutnya atau pada saat pengambilan bansosnya selanjutnya.

Penelitian Basriati (2021), Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warung di Kecamatan Parangloe dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik Pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Parangloe sudah

optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tugasnya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya.

Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, objek penelitian dan tahun penelitian.

4.3.2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Faktor pendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sikap yang antusias Keluarga Penerima Manfaat. Karena warga cukup jelas dan paham tentang penggunaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kecamatan yang cukup besar sehingga bisa

digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pertemuan rutin. Peralatan Komputerisasi dari pihak Kecamatan yang sudah mencukupi untuk pendataan. Dan Keluarga Penerima Manfaat sebagian sudah mempunyai HP Android sehingga bisa masuk kedalam group WA.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah kadang sulit mengumpulkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Apabila KPM meninggal dunia maka tidak bisa otomatis digantikan oleh ahliwarisnya, ahli waris harus masuk dalam DTKS sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan. Kurangnya kesadaran warga tentang pengisian data yang sesuai keadaan, Pembiaran yang terjadi dimasyarakat juga sangat disayangkan karena ada warga yang benar benar tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan warga sekitar hanya diam saja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi sudah berjalan baik dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, kejelasan pada implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah dijelaskan pada penerima manfaat. Dan Konsistensi implemetor melayani masyarakat penerima manfaat dengan baik.
2. Sumber Daya personil sudah mencukupi Dukungan APBN dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah Laptop, Printer.
3. Disposisi/Sikap Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial.

4. Struktur birokrasi pada Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Standar Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama, NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan.
5. Faktor pendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sikap yang antusias Keluarga Penerima Manfaat. Karena warga cukup jelas dan paham tentang penggunaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Kecamatan yang cukup besar sehingga bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pertemuan rutin.
6. Faktor penghambat Kurangnya kesadaran warga tentang pengisian data yang sesuai keadaan, pembiaran yang terjadi dimasyarakat juga sangat disayangkan karena ada warga yang benar benar tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan warga sekitar hanya diam saja.

5.2 Saran

1. Kajian terkait dengan Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. dikaji dari

berbagai perspektif, dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat sebuah implementasi kebijakan melalui teori George Edward III , proses implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika tercapai 4 indikator yakni komunikasi disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi, saran untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melihat dengan baik proses implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Edward III.

2. Setelah dijelaskan secara rinci dan ditarik kesimpulan bahwa proses Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Edward III, akan tetapi peneliti menemukan temuan baru yakni ada indikator politik pada pelaksanaan implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sehingga saran peneliti untuk lanjutan peneliti ini adalah untuk lebih mengkaji pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan dengan menggunakan teori lain, yang melihat indikator-indikator lain seperti indikator keadaan sosial lingkungan, serta indikator keadaan politik dalam sebuah proses implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. 2009. *Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Basriati. 2021. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Makasar*.
- Ekky Dwi Ferlinda. 2020. Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 22-30
- Dian Amalina. 2018. Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Pangan Non tunai dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan rumah tangga di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. *Jurnal Tesis Pasca Sarjana Universitas Palembang*.
- Dewi. 2019. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Eleventh Edition, New Jersey: Perason Prentice Hal.
- Edi Suharto, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.

- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Faraz V Sahidi, Chantel Rapjad. 2019. The impact of social assistance programs on population health: a systematic review of research in high-income countries. *Canada : Jurnal Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, 155 College St, Toronto, ON, M5T 3M7*
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta : Ghalia.
- Helvie Gultom. 2020, *Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.21 No.1*
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sri Lestari Rahayu. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Siti Erna Latifi Suryana. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Metter dan Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process. *Conceptual Frame Work. Journal Administration and Societe*.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Taufiqurrahman. 2016. Dalam Skripsi “*Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik Sampah Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*”.Institut Teknologi Nasional: JurusanTeknik.

Widiyaningrum. 2020. Implementasi kebijakan peraturan menteri sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PHK) oleh dinas sosial di kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 46, No. 2, Oktober 2020: 396 – 407*.

Zulbaidah. 2020. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Nariny Banda Aceh*.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial.

Undang- Undang No. 11/2009; UU No. 13/2011, tentang Penanganan Fakir Miskin.

UU No. 22 Tahun 1999.menegaskan, bahwa dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-undang ini pemberian kewenangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terpadu Kesejahteraan Sosial.

LAMPIRAN

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Catur Edi Wardoyo,SH, Selaku Sekretaris Kecamatan Banyumanik pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 13.30 WIB di ruang kerjanya

Jawaban Informan 1

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Tujuan DTKS adalah dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Komunikasi dilakukan adalah untuk memberikan kejelasan kepada Keluarga Penerima Manfaat tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Bantuan Sosial.
3. Komunikasi dilakukan pada biasanya 1x dalam 1 bulan
4. Komunikasi dilakukan pada saat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial apabila penerima manfaat belum jelas cara pengambilannya.
5. Bisa melaksanakan karena semua sudah ada aturannya sehingga tinggal melaksanakan saja.

Analisa peneliti dengan informan 1 tentang komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima mnafaat. Tujuannya adalah dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Komunikasi dilaksanakan 1 x dalam

satu bulan. Komunikasi dilakukan apabila penerima manfaat belum jelas cara pengambilannya. Bisa melaksanakan komunikasi sudah ada aturannya.

Komunikasi yang dilakukan memberikan penjelasan tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam menerima bantuan sosial bagi penerima manfaat. Komunikasi dilakukan 1 bulan sekali pelaksanaan sesuai dengan aturan.

Kesimpulan dari hasil wawancara adalah bahwa komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima Manfaat. Tujuannya adalah dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Komunikasi dilaksanakan 1 x dalam satu bulan. Komunikasi dilakukan apabila penerima manfaat belum jelas cara pengambilannya. Bisa melaksanakan komunikasi sudah ada aturannya.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Cristiyannah Sri Adijati,S.E, Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banyumanik pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 11.30 WIB di ruang Kerjanya.

Jawaban Informan 2

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.Tujuan adalah untuk mendata bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan sosial.

2. Komunikasi adalah untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial dan masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial.
3. Komunikasi dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan keterangan untuk bisa menjadi peserta DTKS
4. Memahami komunikasi yang dilakukan semua sudah ada aturannya dari Dinas Sosial
5. Bisa melaksanakan karena tinggal mengikuti peraturannya pelaksanaan diharapkan tertib dan lancar.

Analisa peneliti dengan informan 2 tentang komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Data induk bagi penerima bantuan sosial. Tujuan adalah untuk mendata bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan sosial. Komunikasi yang dilakukan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mendapat bantuan sosial. Dan dilakukan pada saat dibutuhkan, memahami tentang komunikasi karena semua sudah ada aturannya. Pelaksanaan tertib dan lancar.

Kesimpulan wawancara berdasarkan dengan informan 2 adalah komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Data induk bagi penerima bantuan sosial. Tujuan adalah untuk mendata bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan sosial. Komunikasi yang dilakukan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mendapat bantuan sosial. Dilaksanakan pada saat dibutuhkan memahami tentang komunikasi karena semua sudah ada aturannya. Pelaksanaan tertib dan lancar.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Sumardi, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Banyumanik pada Hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB di Aula Kecamatan Banyumanik.

Jawaban Informan 3

1. Data terpadu kesejahteraan sosial setau saya.. data yang dibutuhkan untuk penerima bantuan sosial dan tujuannya untuk mengecek data masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial.
2. Komunikasi saya dengan masyarakat ya..pada saat bantuan cair kadang-kadang saya mendampingi.
3. Komunikasi dilakukan yang saya tau..sebulan 1x pada saat pertemuan di Kelurahan.
4. Saya memahami dengan komunikasi yang diberikan oleh petugas Kelurahan tentang DTKS
5. Pelaksanaan Tertib dan Lancar.

Analisa peneliti dengan informan 3 tentang komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data dibutuhkan untuk penerima bantuan sosial dan tujuannya untuk mengecek data masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Komunikasi dilaksanakan pada saat bantuan cair dan dilakukan 1 bulan sekali. Pelaksanaan Tertib dan Lancar.

Kesimpulan wawancara berdasarkan dengan informan 3 adalah komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data untuk penerima bantuan sosial dan tujuannya untuk mengecek data masyarakat

yang mendapatkan bantuan sosial. Komunikasi dilaksanakan pada saat bantuan cair dan dilakukan 1 bulan sekali. Pelaksanaan Tertib dan Lancar.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Dina Kristianingsih, Selaku Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Pada hari Minggu tanggal 29 Janu'ari 2023 Pukul 15.00 WIB di Balai RW.I Tinjomoyo.

Jawaban Informan 4

1. Dikalangan masyarakat pada umumnya DTKS lebih dikenal sebagai data keluarga miskin, anggapan masyarakat bahwa setiap orang yang masuk dalam DTKS adalah masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada penerima bantuan sosial dengan data yang sudah terdaftar di DTKS.
2. Komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada perima bantuan.
3. Komunikasi dilakukan 1x dalam satu bulan
4. Komunikasi yang dilakukan dalam DTKS adalah pendampingan sebagai petugas sosial masyarakat.
5. Pelaksanaan yang dilakukan selama ini tertib dan lancar.

Analisa peneliti dengan informan 4 tentang komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data keluarga miskin, komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi keluarga miskin, dan dilakukan 1 x dalam satu bulan. Komunikasi dilakukan hanya sebagai pendamping. Pelaksanaan tertib dan lancar.

Kesimpulan wawancara berdasarkan dengan informan 4 komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data keluarga

miskin komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan dilakukan 1 x dalam satu bulan. Pelaksanaan tertib dan lancar.

Berdasarkan Wawancara dengan Gita ,selaku petugas IT Kecamatan Banyumanik pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Pukul 14.30WIB di ruang pelayanan.

Jawaban Informan 5

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data dari Dinas Sosial bagi masyarakat untuk bantuan sosial.
2. Komunikasi yang diberikan adalah memberikan pemahaman dan kejelasan bahwa warga yang masuk DTKS adalah warga miskin yang mendapatkan bantuan.
3. Komunikasi dilakukan pada saat warga penerima bantuan butuh untuk mengecek DTKS bantuan sosialnya.
4. Petugas IT hanya mengedit data yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.
5. Pelaksanaan baik, tertib dan lancar.

Analisa peneliti dengan informan 5 tentang komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data dari Dinas Sosial bagi masyarakat untuk bantuan sosial. Komunikasi petugas IT adalah memberikan pemahaman dan Kejelasan bagi warga yang masuk dalam DTKS dan komunikasi dilakukan pada saat dibutuhkan saja. Pelaksanaan baik, tertib dan lancar.

Kesimpulan wawancara berdasarkan dengan informan 4 komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data dari Dinas Sosial bagi warga yang mendapat bantuan sosial.Petugas IT hanya memberikan

pemahaman dan kejelasan .Komunikasi pada saat dibutuhkan .Pelaksanaan baik, tertib dan lancar.

1. Sumber Daya

Faktor sumber daya yang dimaksud disini adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu, ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Pertanyaan tentang Sumber Daya adalah:

1. Apakah personil dalam menangani Data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi?
2. Apakah ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik?
3. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial?

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Catur Edi Wardoyo,SH,
Selaku Sekretaris Kecamatan Banyumanik pada Hari Kamis Tanggal 26
Januari 2023 Pukul 13.30 WIB di ruang kerjanya.

Jawaban Informan 1 tentang Sumber Daya

1. Personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi yaitu adanya Kasie Kesejahteraan Sosial, Tokoh masyarakat, Petugas Sosial Masyarakat dan petugas IT kecamatan jadi jumlahnya 4 personil.
2. Dukungan APBN dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik
3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah Laptop, Printer dan Daftar DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Analisa peneliti dengan informan 1 tentang Sumber Daya personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah mencukupi 4 personil diantaranya Kasie Kesejahteraan Sosial, Tokoh masyarakat, Petugas Sosial Masyarakat dan petugas IT. Dukungan dan dari APBN. Sarana dan prasarana dalam mendukung sumber daya dalam pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial adalah Printer dan Daftar DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Kesimpulan dari wawancara dengan informan 1 adalah tentang Sumber Daya personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah mencukupi. Dukungan dan dari APBN. Sarana dan prasarana dalam mendukung sumber daya dalam pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial adalah Printer dan Daftar DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Cristiyannah Sri Adijati,S.E, Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banyumanik pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 11.30 WIB di ruang Kerjanya.

Jawaban Informan 2

1. Personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik sudah mencukupi ada 4 personil.
2. Dukungan dana dalam rangka pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial dari APBN.
3. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Banyumanik Kelengkapannya adalah laptop dan printer.

Analisa peneliti dengan informan 2 tentang bahwa sumber daya personil di Kecamatan Banyumanik sudah mencukupi. Dukungan dana dari APBN. Sarana dan prasarana laptop dan printer.

Kesimpulan sumber daya personil di Kecamatan Banyumanik sudah mencukupi. Dukungan dana dari APBN. Sarana dan prasarana laptop dan printer.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Sumardi, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Banyumanik pada Hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB di Aula Kecamatan Banyumanik.

Jawaban Informan 3

1. Jumlah Personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial sudah cukup karena utamanya adalah petugas IT.
2. Dukungan dana dari Kementerian Sosial
3. Sarana dan Prasarana tidak punya.

Analisa peneliti dengan informan 3 tentang Sumber Daya jumlah personil sudah cukup utamanya adalah petugas IT, dukungan dana dari Kementerian Sosial sarana dan prasarana tidak punya.

Kesimpulan wawancara dengan informan 3 adalah bahwa jumlah personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial sudah cukup. Dukungan dana dari Kementerian Sosial. Sarana dan prasarana tidak punya.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Dina Kristianingsih Selaku Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Pukul 15.00 WIB di Balai RW.I Tinjomoyo.

Jawaban Informan 4

1. Jumlah personil yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bantuan Sosial menurut saya sudah cukup. Saya sebagai PSM Di Kecamatan Banyumanik.
2. Dukungan Dana dalam Pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Nasional.
3. Sarana dan prasarana adalah data base DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Analisa peneliti dengan informan 4 tentang Sumber Daya bahwa personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial sudah cukup. Dukungan dana dari APBN. Sarana dan prasarana data base DTKS.

Kesimpulan wawancara dengan informan 4 adalah bahwa personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial sudah cukup. Dukungan dana dari APBN. Sarana dan prasarana data base DTKS.

Berdasarkan Wawancara dengan Gita ,selaku petugas IT Kecamatan Banyumanik pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Pukul 14.30WIB di ruang pelayanan.

Jawaban dari Informan 5 tentang sumber daya

1. Personil sudah cukup
2. Dana dari APBN
3. Sarana dan Prasarana Laptop dan printer

Analisa peneliti dengan informan 5 tentang Sumber Daya bahwa personil sudah cukup. Dana dari APBN.Sarana dan Prasarana Laptop dan Printer

Kesimpulan dari wawancara dengan informan 5 adalah Sumber Daya bahwa personil sudah cukup. Dana dari APBN.Sarana dan Prasarana Laptop dan Printer

3. Disposisi/Sikap

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang cukup optimal dengan menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan terkait pertemuan, pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk kedalam rekening masing-masing. Sikap pelaksana menentukan keberjalanan suatu program dengan karakter dan komitmen pelaksana dalam menjalankan suatu program kebijakan. Kasie Kesos Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menjalankan

tugas sebagaimana sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni dalam pelaporan, monitoring, evaluasi dalam disposisi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memiliki karakter sesuai dengan arah kebijakan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, begitu juga dengan sikap dikarenakan Kasie Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banyumanik Kota Semarang langsung turun dan memantau yang terjadi di lapangan dibuatlah komunikasi melalui platform chatting sehingga kebijakan tersebut dijalankan dengan responsif dan efektif.

Pertanyaan tentang Disposisi/Sikap

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?
3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Catur Edi Wardoyo, SH, Selaku Sekretaris Kecamatan Banyumanik pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 13.30 WIB di ruang kerjanya.

Jawaban Informan 1 tentang Disposisi/Sikap

1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial.

2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .
3. Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Analisa peneliti tentang wawancara dengan informan 1 tentang Disposisi/sikap memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya untuk DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Komitmennya adalah membantu warga tidak mampu

Kesimpulan dari wawancara tentang Disposisi/sikap adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya untuk DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Komitmennya adalah membantu warga tidak mampu.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Cristiyannah Sri Adijati,S.E, Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banyumanik pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 11.30 WIB di ruang Kerjanya.

Jawaban Informan 2 tentang Disposisi/Sikap

1. Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan kejelasan tentang DTKS untuk keluarga penerima manfaat sehingga tidak salah paham dengan bantuan sosial yang diberikan untuk penerima manfaat.
2. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya dengan adanya DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

3. Komitmen nya adalah harus benar-benar tulus dan Ikhlas dalam membantu Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Analisa peneliti terhadap wawancara dengan informan 2 tentang Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial memberikan kejelasan sehingga penerima bantuan sosial paham dengan bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya tentang DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial dengan komitmen tulus dan Ikhlas dalam membantu Manfaat Bantuan Sosial.

Kesimpulan dari wawancara tentang Disposisi/sikapImplementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial memberikan kejelasan sehingga penerima bantuan sosial paham dengan bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya tentang DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial dengan komitmen tulus dan Ikhlas dalam membantu Manfaat Bantuan Sosial.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Sumardi, Selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Banyumanik pada Hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB di Aula Kecamatan Banyumanik.

Jawaban Informan 3 tentang Disposisi/Sikap

1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memantau pada saat pada saat bantuan didistribusikan untuk penerima manfaat.
2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .
3. Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu

warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati sehingga warga merasa nyaman.

Analisa peneliti terhadap wawancara dengan informan 3 tentang Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memantau pada saat pada saat bantuan didistribusikan untuk penerima manfaat. Pemerintah Kota Semarang mendukung adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial.Komitmenya adalah membantu warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati sehingga warga merasa nyaman.

Kesimpulan wawancara tentang Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memantau pada saat pada saat bantuan didistribusikan untuk penerima manfaat. Pemerintah Kota Semarang mendukung adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial.Komitmenya adalah membantu warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati sehingga warga merasa nyaman.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Dina Kristianingsih Selaku Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Pada hari Minggu tanggal 29 Janu'ari 2023 Pukul 15.00 WIB di Balai RW.I Tinjomoyo.

Jawaban Informan 4 tentang Disposisi/Sikap

1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial sebagai petugas sosial masyarakat adalah bertanggungjawab untuk pendampingan,dan mengarahkan apabila penerima manfaat dalam menerima bantuan sosial dan untuk penggunaannya.
2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .
3. Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati dan telaten memberikan kejelasan terhadap penerima bantuan.

Berdasarkan Wawancara dengan Gita ,selaku petugas IT Kecamatan Banyumanik pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Pukul 14.30WIB di ruang pelayanan.

Jawaban Informan 5 tentang Disposisi/Sikap

1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai petugas IT Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah bertugas untuk mengecek data pada DTKS Manfaat Penerima Bantuan Sosial sudah sesuai dengan datanya apa

belum, biasanya alamat tidak sesuai dengan undanganya.NIK dan KK tidak sama.

2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .
3. Komimetnya adalah harus sabar dalam melayani masyarakat, kerana tidak semua paham dengan DTKS penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Analisa peneliti terhadap wawancara dengan informan 5 tentang Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial untuk mengecek data pada DTKS Manfaat Penerima Bantuan Sosial sudah sesuai dengan datanya apa belum, biasanya alamat tidak sesuai dengan undanganya.NIK dan KK tidak sama. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial . Komimetnya adalah harus sabar dalam melayani masyarakat, kerana tidak semua paham dengan DTKS penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Kesimpulan wawancara tentang Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial untuk mengecek data pada DTKS Manfaat Penerima Bantuan Sosial sudah sesuai dengan datanya apa belum, biasanya alamat tidak sesuai dengan undanganya.NIK dan KK tidak sama. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Komitmenya adalah harus sabar dalam melayani masyarakat, karena tidak semua paham dengan DTKS penerima Manfaat Bantuan Sosial.

4.1.2 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam penetapan tim koordinasi pada pasal 44 ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, begitu juga selanjutnya diatur pada tingkatan kecamatan, dan kelurahan yang diatur masing-masing melalui Surat Keputusan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka Standar Operasional Prosedur (SOP) akan terlaksana dengan baik.

Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); Vitalitas suatu organisasi; Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Pertanyaan informan tentang Struktur Birokrasi

1. Apakah DTKS dijalankan sesuai dengan SOP Yang ada?
2. Apakah SOP DTKS?

3. Apakah melaksanakan kerjasama dengan Dinas yang terkait untuk pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?
4. Apa permasalahan yang sering terjadi? Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?

Jawaban Informan 1 tentang Struktur Birokrasi

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standrat Operasional Pelayanan
2. Standrat Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama,NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan
3. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang.
4. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.

Analisa peneliti dengan informan 1 tentang Struktur Birokrasi bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standrat Operasional Pelayanan Standrat Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama,NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat

tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.

Kesimpulan tentang Struktur Birokrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standrat Operasional Pelayanan Standrat Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama,NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.

Deskripsi Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Implementasi akan efektif jika langkah-langkah dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman ukuran dan tujuan dasar perlu dikomunikasikan agar para pelaksana mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan yang tepat.

Teori Edward III tentang Komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang sangat kompleks dan rumit. Seseorang dapat

memegangnya hanya untuk tujuan tertentu, atau menyebarkannya. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi menjadi efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus tahu apakah mereka dapat melakukannya. Sebenarnya implementasi kebijakan tersebut harus dapat diterima oleh semua personel dan harus memahami secara jelas dan akurat maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat kerancuan spesifikasi kebijakan, sebenarnya mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang akan diarahkan. Para pelaksana kebijakan bingung apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Komunikasi yang tidak memadai kepada pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Penulis menggunakan Teori Edward III yaitu dengan indikator komunikasi, Sumber daya , sikap / disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban Informan1 tentang Komunikasi adalah bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data untuk keperluan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat. Tujuannya adalah dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Komunikasi dilaksanakan 1 x

dalam satu bulan. Komunikasi dilakukan apabila penerima manfaat belum jelas cara pengambilannya. Bisa melaksanakan komunikasi sudah ada aturannya.

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban Informan 2 tentang Komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Data induk bagi penerima bantuan sosial. Tujuan adalah untuk mendata bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan sosial. Komunikasi yang dilakukan untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat yang mendapat bantuan sosial. Dan dilakukan pada saat dibutuhkan, memahami tentang komunikasi karena semua sudah ada aturannya. Pelaksanaan tertib dan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban Informan 3 tentang Komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data dibutuhkan untuk penerima bantuan sosial dan tujuannya untuk mengecek data masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Komunikasi dilaksanakan pada saat bantuan cair dan dilakukan 1 bulan sekali. Pelaksanaan Tertib dan Lancar.

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban Informan 4 tentang Komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data keluarga miskin, komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi keluarga miskin, dan dilakukan 1 x dalam satu bulan. Komunikasi dilakukan hanya sebagai pendamping. Pelaksanaan tertib dan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban Informan 5 tentang Komunikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data dari Dinas Sosial bagi masyarakat untuk bantuan sosial. Komunikasi petugas IT adalah memberikan pemahaman dan Kejelasan bagi warga yang masuk dalam DTKS dan komunikasi dilakukan pada saat dibutuhkan saja. Pelaksanaan baik, tertib dan lancar.

Penelitian Zulbaidah (2020), Jurnal Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Banda Aceh, Judul Penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial. bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantudalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian disaat pandemin Covid-19 ini banyak kepala keluarga yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kemudian sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,dengan kejadian ini pemerintah memutuskan member kenaikan bantuan yang dulunya Rp 110.000 menjadi Rp 200.000 perbulannya. Diprogram BPNT ini juga para Keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan yang diinginkan. Hambatan dari program BPNT ini dalam proses pendataan penduduk yang mana pemerintah akan member memberikan bantuan BPNT kepada masyarakat yang telah mendaftar di Dinas Sosial yang syarat utamanya penduduk asli gampong Blang Oi, dan hambatan lainnya dalam proses penyediaan

stok barang, yang mana terjadi bebas masyarakat bebas memilih kebutuhannya jadi stok beberapa bahan Pangannya habis dan akan didapatkan diminggu berikutnya atau pada saat pengambilan bansosnya selanjutnya.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama bahwa DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang kurang mampu yang masuk dalam DTKS dan dilaksanakan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah objek penelitian dan tahun penelitian.

2. Sumber Daya

Konsisten pelaksanaan acara dan seberapa akurat komunikasi yang dikirim. Jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan acara kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian pelaksana, informasi yang relevan dan memadai untuk melaksanakan kebijakan dan pemenuhan sumber daya terkait dalam pelaksanaan acara, adanya kewenangan untuk menjamin agar acara dapat terarah seperti yang diharapkan, serta adanya sarana penunjang yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan acara seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia (jumlah dan kapasitas) yang kurang memadai mengakibatkan acara tidak dapat terlaksana dengan sempurna karena tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterampilan/kemampuan pelaksana dalam melaksanakan acara. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik guna meningkatkan kinerja acara. Ketidakmampuan dalam melaksanakan pendistribusian DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika para pelaksana setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/petunjuk pelaksana menanggapi acara terhadap penerimaan atau penolakan, dan intensitas tanggapan. Pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan acara tetapi seringkali gagal melaksanakan acara dengan baik karena mereka menolak tujuan yang terkandung didalamnya sehingga secara diam-diam mereka mengalihkan dan menghindari

pelaksanaan acara. Selain itu, dukungan aparat pelaksana sangat dibutuhkan dalam pencapaian target acara. (Edward III).

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber daya tanggapan Informan 1 Sumber Daya personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah mencukupi 4 personil diantaranya Kasie Kesejahteraan Sosial, Tokoh masyarakat, Petugas Sosial Masyarakat dan petugas IT. Dukungan dan dari APBN. Sarana dan prasarana dalam mendukung sumber daya dalam pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial adalah Printer dan Daftar DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber daya tanggapan Informan 2 Sumber Daya personil di Kecamatan Banyumanik sudah mencukupi. Dukungan dana dari APBN. Sarana dan prasarana labtop dan printer.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber daya tanggapan Informan 3 Sumber Daya bahwa jumlah personil sudah cukup utamanya adalah petugas IT, dukungan dana dari Kementerian Sosial sarana dan prasarana tidak punya.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber daya tanggapan Informan 4 tentang Sumber Daya bahwa personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial sudah cukup. Dukungan dana dari APBN. Sarana dan prasarana data base DTKS.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber daya tanggapan Informan 5 tentang Sumber Daya bahwa personil sudah cukup. Dana dari APBN.Sarana dan Prasarana Laptop dan Printer

Penelitian Ezra Viranny Manoppo (2022) tentang Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan social RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian strategi dalam bentuk Tahapan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, sampai penetapan dan penggunaan. Setiap penerima bantuan RS-RTLH harus terdaftar dalam DTKS yang sudah terverifikasi dan tervalidasi kelengkapan administrasi dan pengecekan dilapangan guna memastikan penerima benar-benar layak untuk dibantu, sehingga bantuan RS-RTLH berupa rumah layak huni menjadi tepat sasaran. Hambatan dan kendala yang didapat dalam penelitian ini berupa keluarga yang sudah mampu namun masih terdata dalam DTKS dan sebaliknya keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak terdata dalam DTKS. Adapun cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah untuk melakukan update data setiap bulannya.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan

sosial. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah Objek penelitian dan tahun penelitian.

3. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika para pelaksana setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/petunjuk pelaksana menanggapi acara terhadap penerimaan atau penolakan, dan intensitas tanggapan. Pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan acara tetapi seringkali gagal melaksanakan acara dengan baik karena mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya sehingga secara diam-diam mereka mengalihkan dan menghindari pelaksanaan acara. Selain itu, dukungan aparat pelaksana sangat dibutuhkan dalam pencapaian target acara. (Edward III).

Berdasarkan hasil penelitian tentang disposisi dan sikap tanggapan dari Informan 1 tentang Disposisi/sikap memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya untuk DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Komitmennya adalah membantu warga tidak mampu.

Berdasarkan hasil penelitian tentang disposisi dan sikap tanggapan dari Informan 2 tentang Disposisi/sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial memberikan kejelasan sehingga penerima bantuan sosial paham dengan bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya tentang DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial dengan komitmen tulus dan Ikhlas dalam membantu Manfaat Bantuan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tentang disposisi dan sikap tanggapan dari Informan 3 tentang Disposisi/sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memantau pada saat pada saat bantuan didistribusikan untuk penerima manfaat. Pemerintah Kota Semarang mendukung adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial.Komitmenya adalah membantu warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati sehingga warga merasa nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian tentang disposisi dan sikap tanggapan dari Informan 4 tentang Disposisi/sikap Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu

Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial sebagai petugas sosial masyarakat adalah bertanggungjawab untuk pendampingan, dan mengarahkan apabila penerima manfaat dalam menerima bantuan sosial dan untuk penggunaannya. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial . Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga yang tulus, dan membimbing dengan sepenuh hati dan telaten memberikan kejelasan terhadap penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang disposisi dan sikap tanggapan dari Informan 5 tentang Disposisi/sikap Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Disposisi/Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial untuk mengecek data pada DTKS Manfaat Penerima Bantuan Sosial sudah sesuai dengan datanya apa belum, biasanya alamat tidak sesuai dengan undanganya. NIK dan KK tidak sama. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial . Komitmenya adalah harus sabar dalam

melayani masyarakat, kerana tidak semua paham dengan DTKS penerima Manfaat Bantuan Sosial.

Penelitian Basriati (2021) tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah sama- sama program bantuan sosial. Perbedaanya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Objek penelitian dan tahun penelitian.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian tentang disposisi dan sikap tanggapan dari Informan 1 tentang Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standrat Operasional Pelayanan Standrat Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama,NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sikap yang antusias Keluarga Penerima Manfaat. Karena warga cukup jelas dan paham tentang penggunaan Bantuan Sosial

dari Pemerintah Aula Kecamatan yang cukup besar sehingga bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pertemuan rutin. Peralatan Komputerisasi dari pihak Kecamatan yang sudah mencukupi untuk pendataan. Dan Keluarga Penerima Manfaat sebagian sudah mempunyai HP Android sehingga bisa masuk kedalam group WA .

2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah kadang sulit mengumpulkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Apabila KPM meninggal dunia maka tidak bisa otomatis digantikan oleh ahliwarisnya , ahli waris harus masuk dalam DTKS sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan. Kurangnya kesadaran warga tentang pengisian data yang sesuai keadaan, Pembiaran yang terjadi dimasyakat juga sangat disayangkan karena ada warga yang benar benar tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan warga sekita hanya diam saja.

MATRIK PERTANYAAN DAN JAWABAN (LANSCAP)

Tabel 4.1

Pertanyaan dan Jawaban tentang Komunikasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p style="text-align: center;">KOMUNIKASI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang DTKS? Apa tujuannya DTKS?2. Bagaimana komunikasi dilakukan ?3. Dalam beberapa kali komunikasi dilakukan?4. Apakah Bapak/Ibu memahami komunikasi yang dilakukan?5. Apakah Bapak/Ibu bisa melaksanakan?	<p style="text-align: center;">Informan 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Tujuan DTKS adalah dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.2. Komunikasi dilakukan adalah untuk memberikan kejelasan kepada Keluarga Penerima Manfaat tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Bantuan Sosial.3. Komunikasi dilakukan pada biasanya 1x dalam 1 bulan4. Komunikasi dilakukan pada saat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial apabila penerima manfaat belum jelas cara pengambilannya.5. Bisa melaksanakan karena semua sudah ada aturannya sehingga tinggal melaksanakan saja.

No	Pertanyaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang DTKS? Apa tujuannya DTKS? 2. Bagaimana komunikasi dilakukan ? 3. Dalam beberapa kali komunikasi dilakukan? 4. Apakah Bapak/Ibu memahami komunikasi yang dilakukan? 5. Apakah Bapak/Ibu bisa melaksanakan? 	<p style="text-align: center;">Informan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Tujuan adalah untuk mendata bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan sosial. 2. Komunikasi adalah untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial dan masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial. 3. Komunikasi dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan keterangan untuk bisa menjadi peserta DTKS 4. Memahami komunikasi yang dilakukan semua sudah ada aturannya dari Dinas Sosial Bisa melaksanakan karena tinggal

No	Pertanyaaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang DTKS? Apa tujuannya DTKS? 2. Bagaimana komunikasi dilakukan ? 3. Dalam beberapa kali komunikasi dilakukan? 4. Apakah Bapak/Ibu memahami komunikasi yang dilakukan? 5. Apakah Bapak/Ibu bisa melaksanakan? 	<p style="text-align: center;">Informan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data terpadu kesejahteraan sosial setau saya.. data yang dibutuhkan untuk penerima bantuan sosial dan tujuannya untuk mengecek data masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. 2. Komunikasi saya dengan masyarakat ya..pada saat bantuan cair kadang-kadang saya mendampingi. 3. Komunikasi dilakukan yang saya tau..sebulan 1x pada saat pertemuan di Kelurahan. 4. Saya memahami dengan komunikasi yang diberikan oleh petugas Kelurahan tentang DTKS 5. Pelaksanaan Tertib dan Lancar
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang DTKS? Apa tujuannya DTKS? 2. Bagaimana komunikasi dilakukan ? 3. Dalam beberapa kali komunikasi dilakukan? 4. Apakah Bapak/Ibu memahami komunikasi yang dilakukan? 5. Apakah Bapak/Ibu bisa melaksanakan? 	<p style="text-align: center;">Informan 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikalangan masyarakat pada umumnya DTKS lebih dikenal sebagai data keluarga miskin, anggapan masyarakat bahwa setiap orang yang masuk dalam DTKS adalah masyarakat kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.Tujuannnya adalah memberikan pemahaman kepada penerima bantuan sosial dengan data yang sudah terdaftar di DTKS.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Komunikasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada perima bantuan. 3. Komunikasi dilakukan 1x dalam satu bulan 4. Komunikasi yang dilakukan dalam DTKS adalah pendampingan sebagai petugas sosial masyarakat. 5. Pelaksanaan yang dilakukan selama ini tertib dan lancar
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang DTKS? Apa tujuannya DTKS? 2. Bagaimana komunikasi dilakukan ? 3. Dalam beberapa kali komunikasi dilakukan? 4. Apakah Bapak/Ibu memahami komunikasi yang dilakukan? 5. Apakah Bapak/Ibu bisa melaksanakan? 	<p style="text-align: center;">Informan 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Tepadu Kesejahteraan Sosial adalah data dari Dinas Sosial bagi masyarakat untuk bantuan sosial. 2. Komunikasi yang diberikan adalah memberikan pemahaman dan kejelasan bahwa warga yang masuk DTKS adalah warga miskin yang mendapatkan bantuan. 3. Komunikasi dilakukan pada saat warga penerima bantuan butuh untuk mengecek DTKS bantuan sosialnya. 4. Petugas IT hanya mengedit data yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang. 5. Pelaksanaan baik, tertib dan lancar

Tabel 4.2
Pertanyaan dan Jawaban tentang Sumber Daya

No	Pertanyaan	Jawaban
2.	<p style="text-align: center;">SUMBER DAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah personil dalam menangani Data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi? 2. Apakah ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik? 3. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial? 	<p style="text-align: center;">Informan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil dalam menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi yaitu adanya Kasie Kesejahteraan Sosial, Tokoh masyarakat, Petugas Sosial Masyarakat dan petugas IT kecamatan jadi jumlahnya 4 personil. 2. Dukungan APBN dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik. 3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah Laptop.

No	Pertanyaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah personil dalam menangani Data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi? 2. Apakah ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik? 3. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial? 	<p style="text-align: center;">Informan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik sudah mencukupi ada 4 personil. 2. Dukungan dana dalam rangka pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial dari APBN. 3. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Banyumanik Kelengkapannya adalah laptop dan printer.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah personil dalam menangani Data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi? 2. Apakah ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik? 3. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial? 	<p style="text-align: center;">Informan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Personil yang menangani DTKS Bantuan Sosial sudah cukup karena utamanya adalah petugas IT. 2. Dukungan dana dari Kementerian Sosial 3. Sarana dan Prasarana tidak punya.

No	Pertanyaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah personil dalam menangani Data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi? 2. Apakah ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik? 3. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial? 	<p style="text-align: center;">Informan 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bantuan Sosial menurut saya sudah cukup. Saya sebagai PSM Di Kecamatan Banyumanik. 2. Dukungan Dana dalam Pelaksanaan DTKS Bantuan Sosial dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Nasional. 3. Sarana dan prasarana adalah data base DTKS yang berasal dari Dinas Sosial Kota Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah personil dalam menangani Data terpadu kesejahteraan sosial untuk keluarga penerima manfaat dalam pelaksanaannya sudah mencukupi? 2. Apakah ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik? 3. Apakah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyumanik dalam Pelaksanaan Implementasi Data 	<p style="text-align: center;">Informan 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil sudah cukup 2. Dana dari APBN 3. Sarana dan Prasarana Laptop dan printer

	Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial?	
--	--	--

Tabel 4.3
Pertanyaan dan Jawaban tentang Disposisi/Sikap

No	Pertanyaan	Jawaban
3.	DISPOSISI/SIKAP	Informan 1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. 2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. 3. Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

No	Pertanyaaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 	<p style="text-align: center;">Informan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memberikan kejelasan tentang DTKS untuk keluarga penerima manfaat sehingga tidak salah paham dengan bantuan sosial yang diberikan untuk penerima manfaat. 2. Pemerintah Kota Semarang mendukung sepenuhnya dengan adanya DTKS Penerima Manfaat Bantuan Sosial. 3. Komitmen nya adalah harus benar-benat tulus dan Ikhlas dalam membantu Penerima Manfaat Bantuan Sosial

No	Pertanyaaan	Jawaban
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan? 2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan 	<p style="text-align: center;">Informan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi

	<p>adanya kebijakan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?</p> <p>3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan</p>	<p>DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah memantau pada saat pada saat bantuan didistribusikan untuk penerima manfaat.</p> <p>2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .</p> <p>3. Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati sehingga warga merasa nyaman.</p>
--	--	---

No	Pertanyaaan	Jawaban
	<p>1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?</p> <p>2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?</p>	<p>Informan 4</p> <p>1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial sebagai petugas sosial masyarakat adalah bertanggungjawab untuk pendampingan,dan</p>

	<p>3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan</p>	<p>mengarahkan apabila penerima manfaat dalam menerima bantuan sosial dan untuk penggunaannya.</p> <p>2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial .</p> <p>3. Komitmen dalam Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah membantu warga yang tulus,dan membimbing dengan sepenuh hati dan telaten memberikan kejelasan terhadap penerima bantuan.</p>
--	--	---

No	Pertanyaaan	Jawaban
	<p>1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?</p> <p>2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?</p> <p>3. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan Data Terpadu Kesejahteraan</p>	<p>Informan 5</p> <p>1. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai petugas IT Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kebijakan terhadap Implementasi DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial adalah bertugas untuk mengecek data pada DTKS Manfaat Penerima Bantuan Sosial sudah sesuai dengan datanya apa belum, biasanya alamat tidak sesuai dengan</p>

	Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan	<p>undanganya.NIK dan KK tidak sama.</p> <p>2. Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh dengan adanya DataTerpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial</p> <p>3. Komimetnya adalah harus sabar dalam melayani masyarakat, kerana tidak semua paham dengan DTKS penerima Manfaat Bantuan Sosial.</p>
--	--	--

Tabel 4.4
Pertanyaan dan Jawaban tentang Struktur Birokrasi

No	Pertanyaaan	Jawaban
4.	<p style="text-align: center;">STRUKTUR BIROKRASI</p> <p>1. Apakah DTKS dijalankan sesuai dengan SOP Yang ada?</p> <p>2. Apakah SOP DTKS?</p> <p>3. Apakah melaksanakan kerjasama dengan Dinas yang terkait untuk pelaksanaan Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan?</p> <p>4. Apa permasalahan yang sering terjadi? Bagaimana cara</p>	<p style="text-align: center;">Informan 1 – 4</p> <p>1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah sesuai dengan Standrat Operasional Pelayanan</p> <p>2. Standrat Operasional Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah melalui petugas IT di masing-masing Kelurahan atau Kecamatan dengan mengecek Nama,NIK dengan undangan yang sudah diberikan kepada masing-masing penerima bantuan</p>

	mengatasi permasalahan tersebut?	<ol style="list-style-type: none">3. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang.4. Permasalahan yang sering terjadi bahwa alamat tidak sesuai dengan penerima manfaat tidak sesuai dengan DTKS. Dan cara mengatasinya dengan meminta surat domisili dari Kelurahan.
--	----------------------------------	---